

LAPORAN BULANAN

POKJA PAPUA PRODUKTIF



PERIODE NOVEMBER 2025





KEGIATAN – KEGIATAN STRATEGIS





Indikator Pembangunan Papua Produktif

Tingkat Kemiskinan

20,66%

Baseline (2022): 21,33
Target (2024): 19,03



TPT

4,85%

Baseline (2022): 5,37



Realisasi Investasi

Rp 14,52 Triliun

Baseline (2021): Rp919,07 M



FGD PENGEMBANGAN EKONOMI ORANG ASLI PAPUA MELALUI PROGRAM PAPUA PRODUKTIF



Forum diskusi mengenai pengembangan ekonomi Orang Asli Papua (OAP) melalui program Papua Produktif dibuka dengan sambutan-sambutan dari berbagai pihak, termasuk perwakilan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan dan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat, dan staf ahli Gubernur Provinsi Papua Barat. Dalam sambutan pembukaan, ditekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perbankan, pelaku usaha, dan masyarakat untuk memajukan ekonomi Papua Barat. Program Papua Produktif merupakan salah satu fokus percepatan pembangunan dan otonomi khusus Papua yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan OAP. Kunjungan Wakil Presiden ke Papua Barat juga menjadi momentum penting untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan memperkuat komitmen pemerintah pusat dalam pembangunan daerah.

Fokus Group Discussion yang dilaksanakan pada Rabu, 12 November 2025, bertempat di Gedung Keuangan Negara L III, Arfai, Provinsi Papua Barat. Dengan Peserta: STAF AHLI BIDANG EKONOMI Perwakilan Gubernur Provinsi Papua Barat, KAKANWIL DJPb - Kepala Sekretariat BP3OKP RI, MRP Papua Barat, DPR Papua Barat, Kepala OPD di Provinsi Papua Barat, Pimpinan Bank Indonesia, Pimpinan Bank Papua, Pimpinan Pelaku Usaha, UMKM, Kontraktor, dan Swadaya Masyarakat

Diskusi ini menyoroti berbagai tantangan dan peluang dalam pengembangan ekonomi Papua Barat. Data menunjukkan bahwa meskipun Papua Barat kaya akan sumber daya alam, pertumbuhan ekonomi masih didominasi oleh sektor ekstraktif seperti LNG Tangguh, dengan penyerapan tenaga kerja yang minim di sektor tersebut. Sebaliknya, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyerap sebagian besar tenaga kerja namun kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masih kecil. Komoditas unggulan seperti sagu, sukun, kelapa, kelapa sawit, ikan, dan udang memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui hilirisasi dan industrialisasi, yang diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah ekonomi lokal.

Beberapa peserta forum menyampaikan masukan dan keluhan, terutama terkait kurangnya proteksi produk lokal, lambatnya pencairan anggaran pemerintah daerah, serta kurangnya pendataan dan pendampingan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) OAP. Ditekankan perlunya sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan keterlibatan aktif masyarakat adat serta komunitas dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, teknologi, akses pembiayaan, dan ego sektoral masih menjadi hambatan yang perlu diatasi secara sistemik.



FGD PENGEMBANGAN EKONOMI ORANG ASLI PAPUA MELALUI PROGRAM PAPUA PRODUKTIF

Indikator Pembangunan Papua Produktif

Tingkat Kemiskinan

20,66%

Baseline (2022): 21,33
Target (2024): 19,03



TPT

4,85%

Baseline (2022): 5,37



Realisasi Investasi

Rp 14,52 Triliun

Baseline (2021): Rp919,07 M



Menanggapi masukan tersebut, Plt Kepala Bappeda Provinsi Papua Barat menyatakan komitmen pemerintah provinsi untuk memastikan program-program berjalan tepat sasaran, dengan fokus pada evaluasi dan pendampingan. Bank Indonesia juga menyatakan kesiapannya untuk mendukung pemerintah daerah dalam menyusun roadmap hilirisasi dan penguatan UMKM, serta meningkatkan inklusi keuangan. Forum ini diharapkan tidak hanya berhenti pada diskusi, tetapi menghasilkan rekomendasi konkret dan membentuk wadah kolaborasi, seperti Forum Ekonomi Papua Barat Produktif dan Perdamaian, untuk mengawal implementasi program-program pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Papua Barat.

BP3OKP akan terus mengambil peran strategis dalam mendukung kebijakan Pemerintah, khususnya dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas ekonomi lokal sesuai dengan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua 2025-2029.

Keberlanjutan Pembangunan Ekonomi Papua Barat

- Papua Barat memiliki fondasi yang kuat untuk pengembangan industri pengolahan padat karya berbasis komoditas lokal yang kaya, seperti perkebunan dan perikanan.
 - Pentingnya hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah, menyerap tenaga kerja lokal, dan mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
 - Sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, perbankan, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci untuk mengatasi tantangan struktural seperti infrastruktur, teknologi, dan akses pembiayaan.
- Transformasi ekonomi di Papua Barat harus beralih dari yang berbasis proyek besar menjadi ekonomi yang berbasis aktivitas masyarakat dan konsumsi lokal.

Pentingnya Inklusi dan Keberpihakan

- Program Papua Produktif adalah agenda strategis untuk mendukung transformasi ekonomi, diversifikasi potensi lokal, dan pemberdayaan OAP.
 - Diperlukan kebijakan yang tepat, dukungan infrastruktur yang memadai, dan akses pasar yang lebih luas untuk memberdayakan OAP sebagai pelaku utama pembangunan.
 - Pembangunan ekonomi harus fokus pada keadilan ekonomi, pemerataan kesempatan, dan pemberdayaan masyarakat lokal.
- Dana Otonomi Khusus harus benar-benar berpihak kepada OAP, dan kinerjanya harus terukur untuk memastikan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.



Indikator Pembangunan Papua Produktif

Tingkat Kemiskinan

20,66%

Baseline (2022): 21,33
Target (2024): 19,03



TPT

4,85%

Baseline (2022): 5,37



Realisasi Investasi

Rp 14,52 Triliun

Baseline (2021): Rp919,07 M



Komitmen Bersama

Pemerintah Provinsi Papua Barat berkomitmen untuk terus mengoptimalkan sumber daya lokal, baik alam maupun manusia, dengan kebijakan yang tepat dan dukungan yang diperlukan.

- BP3OKP, pemerintah daerah, perbankan, dan masyarakat diundang untuk berkolaborasi dalam mewujudkan Papua Barat yang sehat, cerdas, produktif, dan bermakna.
- Dengan semangat akselerasi, inovasi, dan sinergi, diharapkan Papua dapat bangkit, produktif, dan maju.

FGD PENGEMBANGAN EKONOMI ORANG ASLI PAPUA MELALUI PROGRAM PAPUA PRODUKTIF

Tindak-Lanjut

1. Bappeda perlu segera mengumpulkan dan memverifikasi database UMKM OAP dari perangkat daerah, termasuk informasi usaha mikro dan makro, alamat, dan jenis usaha, untuk memastikan program bantuan tepat sasaran.
2. Pemerintah Provinsi Papua Barat diharapkan dapat mempercepat realisasi belanja daerah, terutama anggaran Otonomi Khusus, agar perputaran ekonomi di daerah dapat bergerak lebih awal di tahun 2026.
3. Pemerintah daerah dan dinas terkait perlu aktif turun ke lapangan dan memberikan sosialisasi serta pendampingan kepada Mama-Mama Papua dan petani OAP untuk mengelola lahan pertanian secara produktif dan meningkatkan hasil panen.
4. Dinas Perikanan perlu berkolaborasi dengan Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (Himni) untuk mengusulkan alat tangkap yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat nelayan dan membangun sentra pengolahan ikan (cold storage, pabrik es, air bersih).
5. DPRD Provinsi Papua Barat dan MRP diimbau untuk berkolaborasi dalam merumuskan produk hukum daerah (Perdasus/Perdasi) yang melindungi dan mendukung hak-hak OAP, terutama dalam pengembangan ekonomi lokal.
6. Perbankan diharapkan dapat mengembangkan skema pembiayaan yang lebih fleksibel, mudah diakses, dan sesuai dengan karakteristik usaha lokal OAP, serta meningkatkan edukasi keuangan kepada masyarakat.
7. Pemerintah Provinsi Papua Barat perlu mempertimbangkan kebijakan untuk mengintervensi perbankan agar memprioritaskan akses kredit bagi OAP yang memiliki usaha.
8. BP3OKP akan memfasilitasi pembentukan forum Ekonomi Papua Barat Produktif dan Perdamaian sebagai wadah dialog dan koordinasi antara semua stakeholders untuk mengawal program-program pengembangan ekonomi.
9. BP3OKP akan terus memediasi dan mengoordinasikan antara masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat untuk mengatasi masalah-masalah pembangunan, termasuk kasus ganti rugi tanah dan infrastruktur.
10. Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran untuk Perusahaan Daerah (Perusda) agar dapat membeli hasil produksi pertanian dan perikanan masyarakat, memotong rantai pasok, dan menstabilkan harga produk lokal.



Indikator Pembangunan Papua Produktif

Tingkat Kemiskinan

20,66%

Baseline (2022): 21,33
Target (2024): 19,03



TPT

4,85%

Baseline (2022): 5,37



Realisasi Investasi

Rp 14,52 Triliun

Baseline (2021): Rp919,07 M



BP3OKP-RI PERWAKILAN PAPUA BARAT DAN BAPPEDA KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK



Kunjungan kerja yang di laksanakan pada Senin 24 November 2025, di kantor Bappeda Kabupaten Pegunungan Arfak. Kunjungan yang di laksanakan oleh Anggota Pokja Papua Produktif yaitu dalam rangka Akselerasi Penyerapan Anggaran Tahun 2025 dan Rencana Program Tahun 2026

LATAR BELAKANG

Anggota Pokja Papua Produktif, Stap, ST. menindaklanjuti penyampaian berdasarkan hasil pertemuan dengan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Bapak Ali Baham. Beliau menyampaikan bahwa realisasi belanja per 14 November 2025 adalah 45% menurut data Kemendagri, namun data keuangan menunjukkan 51,9%.

Bapak stap ST. juga menambahkan bahwa; Terdapat rendahnya kinerja penyaluran TKD (Transfer ke Daerah) yang beragam di Provinsi Papua Barat dan 7 kabupaten.

1. Data per 14 November 2025 menunjukkan bahwa realisasi TKD masih jauh dari persentase yang diharapkan.
2. Ini mencakup dana DAU, DBH, fisik, dana desa, dana Otsus, dan insentif, terutama insentif perbatasan.
3. Perbedaan data antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan menunjukkan perlunya penyelarasan.
4. Data Kemendagri menunjukkan realisasi belanja 45%, sementara data keuangan menunjukkan 51,9%.
 - Realisasi penyaluran dan penyerapan anggaran harus dibedakan.
 - Kemenkeu menghitung persentase penyaluran, yaitu pemindahan uang dari negara ke daerah.
 - Pemda menghitung realisasi penyerapan berupa belanja.
 - Disparitas ini menyebabkan angka yang berbeda, namun diharapkan akan sama di awal tahun 2026.

FOKUS

- Kabupaten Pegunungan Arfak telah menyalurkan hampir seluruh Dana Otsus, tersisa DTI Tahap 3
- BP3OKP-RI Perwakilan Papua Barat menegaskan pentingnya percepatan penyaluran anggaran dan memastikan setiap proses didukung oleh dokumen perencanaan sehingga pelaksanaan anggaran tetap sejalan dengan arah kebijakan pembangunan di kabupaten Pegunungan Arfak



Indikator Pembangunan Papua Produktif

Tingkat Kemiskinan

20,66%

Baseline (2022): 21,33
Target (2024): 19,03



TPT

4,85%

Baseline (2022): 5,37



Realisasi Investasi

Rp 14,52 Triliun

Baseline (2021): Rp919,07 M



BP3OKP-RI PERWAKILAN PAPUA BARAT DAN BAPPEDA KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK



Kepala Bappeda Kab. Pegunungan Arfak menanggapi terkait penyerapan anggaran tahun 2025 dan perencanaan penggunaan dana tahun 2026. Beliau menyampaikan bahwa tugas pokok di Bappeda salah satunya yaitu perencanaan, terkait dengan KAK, RAP sudah kami dilaksanakan. Untuk dana realisasi kami juga tidak tau mungkin yang lebih mengetahui terkait realisasi hingga pada penyerapan anggaran merupakan tugas dari Keuangan.

Beliau juga menambahkan "Untuk pencairan tahap ketiga itu sudah yang bersumber dari **Dana Otsus**: Otsus 1%/bloggren (sudah Pencairan), Otsus 1,25/spesifik gren (sudah Pencairan), DTI (belum pencairan) karena ada beberapa kendala karena di laporkan berdasarkan data fisik sehingga agak terlambat, Selanjutnya untuk DBH migas otsus (menunggu pencairan) untuk kabupaten pegaf sudah di ajukan tetapi itu kolektif karena merupakan kewenangan provinsi harus semua kabupaten punya harus selesai sehingga pencairan. Untuk tahun 2026 belum. kami lagi bahas

Kesimpulan:

Bappeda Kabupaten Pegaf dalam tugas perencanaannya telah melaksanakan KAK dan RAP hingga pada tahap ketiga. Khusus untuk Dana tahap ketiga yang bersumber dari Otsus%, Otsus 1,25% sudah pencairan, sedangkan untuk DTI belum pencairan dikarenakan dalam pelaporannya harus di sertakan pada data data fisik sehingga agak terlambat, selanjutnya DBH Migas Otsus (Menunggu Pencairan) untuk Kabupaten Pegaf sudah di ajukan tetapi itu kolektif karena merupakan kewenangan Provinsi sehingga harus menunggu kabupaten-kabupaten yang belum menyelesaikan KAK dan RAP sehingga secara bersamaan dapat di salurkan

Tindak Lanjut

1. DBH Migas Otsus Kabupaten Pegaf terjadi Ketimpangan dalam pembagian dana ke OPD, sehingga OPD-OPD tertentu yang menyebabkan terjadi devisa. DBH Migas Otsus untuk sekarang ini Menu/sub kegiatan di batasi kalau bisa di buka slot sub kegiatan sehingga OPD OPD lain juga bisa menerima.



Indikator Pembangunan Papua Produktif

Tingkat Kemiskinan

20,66%

Baseline (2022): 21,33
Target (2024): 19,03



TPT

4,85%

Baseline (2022): 5,37



Realisasi Investasi

Rp 14,52 Triliun

Baseline (2021): Rp919,07 M



BP3OKP-RI PERWAKILAN PAPUA BARAT DAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK



Kunjungan kerja yang dilaksanakan oleh Anggota Pokja Papua Produktif BP3OKP PB perwakilan Papua Barat, Pada Selasa 25 November 2025 adalah untuk berkoordinasi Dengan Dinas Pariwisata Pegunungan Arfak serta meninjau lokasi persiapan Destinasi Wisata.

Sekertaris Dinas Pariwisata, menyapaikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak melalui Dinas Pariwisata tengah gencar melakukan promosi akan potensi pariwisata di wilayah yang akrab di sebut Pegunungan Arfak (Pegaf). Tak tanggung-tanggung, Pegaf didapuk sebagai pariwisata pegunungan bersanding dengan Raja Ampat sebagai pariwisata bahari yang bakal jadi andalan kabupaten. Adapun beberapa objek wisata yang bisa ditemukan di Pegunungan Arfak berdasarkan tinjauan, seperti Danau Perempuan (Anggi Gida) dan Danau laki-laki (Anggi Giji), Air terjun, Gua Laomot yang diklaim terpanjang setelah perancis dengan 2.800 meter vertical dan horizontal, rumah tradisional suku arfak yang di sebut rumah kaki seribu, bunga andemik anggrek, hingga pulau mengapung yang bisa bergerak sendiri yang kini belum bertuan.

Adapun tanaman holtikultura yang menjadi sumber penghidupan masyarakat juga bisa mendorong dengan adanya Kawasan wisata berbentuk danau yang terletak di ketinggian sekitar 2.000 meter diatas permukaan air laut (mdpl) itu. Selain tentunya, penyediaan penginapan yang di Kelola oleh masyarakat.



Indikator Pembangunan Papua Produktif

Tingkat Kemiskinan

20,66%

Baseline (2022): 21,33
Target (2024): 19,03



TPT

4,85%

Baseline (2022): 5,37



Realisasi Investasi

Rp 14,52 Triliun

Baseline (2021): Rp919,07 M



BP3OKP-RI PERWAKILAN PAPUA BARAT DAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK

Tantangan Dinas Pariwisata

Infrastruktur Jalan yang Buruk: Akses transportasi darat menuju dan di dalam kawasan Pegunungan Arfak masih sangat menantang, didominasi oleh jalan berbatu dan tanah. Hal ini menjadi penghambat utama bagi wisatawan untuk berkunjung dengan nyaman.

- Keterbatasan SDM: Terdapat kekurangan tenaga profesional dan terlatih dalam pengelolaan serta pelayanan pariwisata di daerah tersebut. Ini mencakup pemandu wisata lokal dan staf yang mampu mengelola produk wisata.
- Pengelolaan Objek Wisata yang Belum Optimal: Meskipun Pegunungan Arfak memiliki potensi alam yang luar biasa (sering disandingkan dengan Raja Ampat), banyak objek wisata yang belum dikelola secara maksimal atau bahkan belum terkelola sama sekali.
- Masalah Sampah: Adanya kekhawatiran dari pihak legislatif setempat mengenai potensi masalah sampah di lokasi wisata jika tidak ditangani dengan serius oleh dinas terkait.
- Perlunya Perhatian dan Dukungan Pemerintah: Pemerintah daerah dan pusat didorong untuk memberikan perhatian khusus dan dukungan strategis dalam pengembangan kawasan ini, termasuk dalam hal promosi dan investasi.
- Sinergi Antar Pemangku Kepentingan: Kurangnya koordinasi atau sinergi yang optimal antar berbagai pihak terkait (pemerintah daerah, masyarakat lokal, dan investor) juga menjadi tantangan dalam pembangunan pariwisata yang terintegrasi.



Capaian dan Fokus Utama

- Pengembangan Desa Wisata: Salah satu program utama adalah fasilitasi dan pembinaan masyarakat lokal untuk pengembangan desa wisata di Kabupaten Pegunungan Arfak. Kegiatan ini melibatkan pelatihan bagi masyarakat pengelola desa wisata, pemandu wisata, dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).
- Identifikasi Destinasi Ekowisata: Universitas Papua (UNIPA) bekerja sama dengan pihak terkait, termasuk Dinas Pariwisata, telah mengidentifikasi 10 lokus destinasi ekowisata andalan di Pegunungan Arfak untuk penyusunan dokumen pemetaan, yang menjadi dasar pengembangan lebih lanjut.
- Potensi Belum Terkelola Optimal: Meskipun memiliki potensi wisata alam yang sangat indah, seperti Danau Anggi dan keindahan pegunungan, sebagian besar objek wisata di Pegaf dilaporkan masih belum dikelola secara optimal dan memerlukan perbaikan infrastruktur.
- Pariwisata Berbasis Konservasi: Terdapat penekanan pada pengembangan pariwisata yang mengedepankan aspek konservasi alam dan budaya Orang Asli Papua (OAP), yang sejalan dengan karakteristik geografis wilayah tersebut.



Indikator Pembangunan Papua Produktif

Tingkat Kemiskinan

20,66%

Baseline (2022): 21,33
Target (2024): 19,03



TPT

4,85%

Baseline (2022): 5,37



Realisasi Investasi

Rp 14,52 Triliun

Baseline (2021): Rp919,07 M



BP3OKP-RI PERWAKILAN PAPUA BARAT DAN PETANI MILENIAL KOPI ARABIKA ANGGI



Selasa 25 November 2025, pukul 15.00 WIT, Anggota Pokja Papua Produktif melakukan kunjungan lapangan untuk melihat lokasi penanaman dan penyebaran Kopi Arabika. Dalam kunjungan lapangan tersebut Anggota Pokja Papua Produktif mewawancarai salah satu petani milenial kopi arabika “Berto Inden, yang merupakan Anak mudah asli Arfak.

Kopi Arabika di Kabupaten Pegunungan Arfak (Pegaf) terus dikembangkan dengan fokus pada varietas unggul seperti Arabika S 795, memanfaatkan topografi pegunungan tinggi (800-3000 mdpl) dan dukungan pemerintah daerah untuk menjadikan kopi sebagai ikon baru selain Danau Anggi, dengan melibatkan petani secara langsung dari penanaman hingga panen, bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan potensi pariwisata daerah, seperti yang diupayakan dengan penanaman bibit kopi Wamena. “Ujar Berto Inden

Berto Inden” Memohon bantuan kepada Pemda Pegunungan Arfak dan Pemprov Papua Barat untuk dapat membantu masyarakat local berupa benih kopi. Ia juga berharap 10 Distrik yang berada di Kabupaten Pegunungan Arfak bisa mendapatkan benih.

Potensi dan Pengembangan Kopi Pegaf

- Varietas Unggul: Varietas yang dikembangkan antara lain Arabika S 795, yang menunjukkan keberhasilan dan potensi untuk dikembangkan lebih lanjut di wilayah lain, serta bibit kopi Wamena.
- Kondisi Geografis: Pegaf memiliki topografi bergelombang hingga pegunungan dengan ketinggian ideal untuk kopi Arabika (800-3000 mdpl), menjadikannya sangat potensial.
- Dukungan Pemerintah: Pemerintah menyiapkan lahan 2.000 hektare dan mengawal proses pengembangan, menekankan kepemilikan petani atas hasil panennya, dan menjadikan kopi sebagai ikon baru daerah.

Strategi Pengembangan: Melalui analisis SWOT, strategi yang diterapkan meliputi optimasi lahan, peningkatan keterampilan teknis petani, penguatan kelembagaan kelompok tani, dan pembukaan jaringan pemasaran.



Indikator Pembangunan Papua Produktif

Tingkat Kemiskinan

20,66%

Baseline (2022): 21,33
Target (2024): 19,03



TPT

4,85%

Baseline (2022): 5,37



Realisasi Investasi

Rp 14,52 Triliun

Baseline (2021): Rp919,07 M



BP3OKP-RI PERWAKILAN PAPUA BARAT DAN PETANI MILENIAL KOPI ARABIKA ANGGI

Capaian Utama Kopi Arabika Anggi

- **Pengakuan Nasional:** Kopi Anggi telah berhasil menembus pasar nasional. Salah satu pemilik usaha, Barto Inden, yang merupakan Duta Petani Milenial Kementerian Pertanian, berhasil membawa produk Kopi Anggi dikenal luas di tingkat nasional.
- **Lolos Seleksi Nasional:** Kopi Anggi berhasil lolos seleksi Industri Kreatif Syariah (IKRA) tingkat nasional, sebuah pencapaian yang difasilitasi oleh Bank Indonesia Provinsi Papua.
- **Upaya Standardisasi Mutu:** Terdapat inisiatif aktif dari Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Papua Barat untuk mendorong Kopi Anggi mencapai Standar Nasional Indonesia (SNI) mutu biji kopi. Hal ini dilakukan melalui diseminasi dan sosialisasi perawatan serta pascapanen kepada petani lokal untuk menjaga dan meningkatkan kualitas produk.
- **Potensi Pengembangan Lahan:** Lahan di sekitar Danau Anggi dinilai sangat potensial untuk pengembangan kopi Arabika lebih lanjut, dengan potensi area hingga 500 hektar yang siap dikembangkan.
- **Bantuan dan Pengembangan Bibit:** Petani di Distrik Anggi dan Sururey telah menerima bantuan 10.000 anakan benih Kopi Arabika S795 untuk meningkatkan produksi dan kualitas tanaman.

Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam visibilitas dan kualitas Kopi Arabika Anggi, didukung oleh pemerintah daerah dan pusat, serta inisiatif dari para petani milenial lokal.



Tujuan Utama

- Memberikan nilai tambah bagi masyarakat petani.
- Menjadikan Pegaf terkenal dengan kopinya, melengkapi pariwisata yang sudah ada (seperti Danau Anggi).

Kesimpulan

Kopi Arabika Pegaf adalah komoditas yang sedang digalakkan Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemkab Pegaf sebagai pengembangan ekonomi berbasis pertanian, dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat sektor pariwisata melalui produk kopi berkualitas.



Indikator Pembangunan Papua Produktif

Tingkat Kemiskinan

20,66%

Baseline (2022): 21,33
Target (2024): 19,03



TPT

4,85%

Baseline (2022): 5,37



Realisasi Investasi

Rp 14,52 Triliun

Baseline (2021): Rp919,07 M



Hari Rabu 26 November 2025, Anggota Pokja Papua Produktif melakukan Sinkronisasi, Evaluasi, Harmonisasi dan Koordinasi (SHEK) dalam rangka Akselerasi Penyerapan Anggaran Tahun 2025 Dan Rencana Anggaran Program Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2026 ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pegunungan Arfak.

Latar Belakang

Dana Otsus Tahap 2 belum tersalur secara lengkap untuk beberapa Pemda, yaitu Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Fakfak, dan Kabupaten Kaimana. Kabupaten Pegunungan Arfak menjadi satu-satunya daerah yang telah menyalurkan Dana Otsus tahap 3 (Kecuali DTI).

Penyerapan Anggaran per- 20/11/2025

1. Dana Otsus 1% dan 1,25%
 - Sudah cair sampai tahap ke 3: Untuk mencapai tahap syarat salur minimal
 - realisasi penyerapan anggaran 75%
 - Capaian Outputnya diatas 50%
2. Dana Tambahan Infrastruktur (DTI)
 - sampai saat ini belum karena harus menunggu progress lapangan dari SKPD. Ketika capaian output di lapangan belum mencapai progress SKPD tidak bisa mengajukan
4. Dana Alokasi Umum (DAU)
 - Ditransfer perbulan: untuk menanggulangi gaji
 - Spesifik Gren syarat salurnya sudah 100%

Realisasi pertanggal 14/11/2025

Capaian output untuk semua dana kabupaten Pegunungan Arfak 55,99%

Target dan Fokus

- Target Kabupaten Pegunungan Arfak untuk penyerapan anggaran sampai bulan Desember mencapai 90%
- Mengejar penyerapan dana-dana yang belum masuk sehingga cepat untuk masuk karena kebutuhan belanja daerah sampai bulan Desember pekerjaan sudah mulai terganggu.

Capaian

1. Kabupaten Pegunungan Arfak menjadi satu-satunya daerah yang telah menyalurkan dana otsus tahap 3 (kecuali DTI tahap 3)
2. Realisasi Pertanggal 14 November 2025 Capaian output untuk semua dana sudah mencapai 55,99% khusus Kabupaten Pegunungan Arfak.



RAPAT KOORDINASI TEKNIS BP3OKP-RI, PEMDA PROVINSI PAPUA BARAT DAN KANWIL DJPB PAPUA BARAT

Rapat koordinasi Teknis (Rakornis) dalam rangka akselerasi penyerapan anggaran tahun 2025 dan rencana anggaran program tahun 2026 yang digelar pada Rabu, 19 November 2025 di Aula Kauari, Lt III Gedung keuangan Negara Manokwari.

Plt. Kepala Bappeda Provinsi Papua Barat, Deassy D. Tetelepta, ST, menghadiri rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Akselerasi penyerapan anggaran tahun 2025 dan rencana anggaran program tahun 2026. rapat di buka oleh sekretaris daerah Provinsi Papua Barat, Drs. Alhi Baham temongmere, MTP, yang dalam arahnya menyampaikan bahwa realisasi anggaran papua barat hingga triwulan IV masih tergolong rendah. Berdasarkan surat kementerian dalam negeri RI, realisasi baru mencapai 45 %, sementara data kementerian keuangan menunjukan angka 51%. Mengingat tersisa satu bulan efektif, pemerintah provinsi perlu mempercepat realisasi tersebut. Sekda juga menambahkan bahwa penetapan KUA-PPAS dijadwalkan pada 20 November 2025.

Dalam rangka Rakornis ini, BP3OKP menekankan perlunya percepatan penyaluran transfer ke daerah (TKD) dan mengevaluasi kemungkinan pendampingan langsung ke kabupaten bersama pemerintah provinsi dan DJPB. Hal ini disebabkan rendahnya penyaluran beberapa jenis dana seperti DAU, DBH, DAK Fisik/Non Fisik, Dana Desa, Dana Otsus, serta dana Insentif, berdasarkan data TKD per 14 November 2025.

Sementara itu, Plt. Kepala Bappeda menjelaskan bahwa Bappeda telah melakukan tagging terhadap program dan kegiatan yang menggunakan dana otsus. Setelah KUA-PPAS ditetapkan, hasil tagging tersebut akan otomatis terintegrasi ke SIKD sebagai RAP Otsus. Ia menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah penerima dana otsus diminta segera Menyusun rencana anggaran, yang selanjutnya akan dievaluasi agar sesuai dengan target program unggulan gubernur dan wakil gubernur. Keterlambatan salur pada periode sebelumnya terjadi karena ketidakpatuhan perangkat daerah terhadap arahan belanja, sehingga Bappeda bersama BPKAD dan Inspektorat akan memperketat pengawasan.

Perwakilan DJPb Kanwil Papua Barat juga menyampaikan bahwa perbedaan angka realisasi antara kemendagri dan kemenkeu terjadi karena perbedaan metode perhitungan, dimana kemendagri menggunakan basis penyerapan sementara kemenkeu menggunakan dasar penyaluran.

Menutup rangkaian kegiatan, Sekda Kembali menegaskan pentingnya percepatan penyaluran anggaran dan memastikan setiap proses di dukung oleh dokumen perencanaan seperti RKP dan RPJMD, sehingga pelaksanaan anggaran tetap sejalan dengan arahan kebijakan pembangunan provinsi papua barat.



RAPAT KOORDINASI TEKNIS BP3OKP-RI, PEMDA PROVINSI PAPUA BARAT DAN KANWIL DJPB PAPUA BARAT



Gambaran Umum

Koordinasi Teknis Akselerasi Penyerapan Anggaran

- Rapat koordinasi teknis akselerasi penyerapan anggaran tahun 2025 dan rencana anggaran program (RAP) Provinsi Papua Barat tahun 2026 diselenggarakan.
 - Tujuan utama rapat adalah untuk mempercepat penyerapan anggaran dan memastikan perencanaan anggaran yang lebih baik di masa depan.

Latar Belakang dan Permasalahan

- Terdapat rendahnya kinerja penyaluran TKD (Transfer ke Daerah) yang beragam di Provinsi Papua Barat dan 7 kabupaten.
 - Data per 14 November 2025 menunjukkan bahwa realisasi TKD masih jauh dari persentase yang diharapkan.
 - Ini mencakup dana DAU, DBH, fisik, dana desa, dana Otsus, dan insentif, terutama insentif perbatasan.
- Tantangan dalam realisasi APBD tahun 2025 diidentifikasi sebagai berikut:
 - Investasi anggaran sebesar Rp21 miliar di tahun 2025 memerlukan adaptasi administrasi yang tidak mudah.
 - Keterlambatan perlengkapan pekerjaan dan proses tender yang tidak dilakukan secara dini menjadi hambatan, karena kurangnya kepastian data.
 - Informasi yang kadang diolah dari sumber lain dan miss-informasi menjadi kesulitan dalam pengambilan keputusan.
 - Keterlambatan pemerintah karena cuaca dan keterlambatan penagihan juga berkontribusi pada rendahnya penyerapan anggaran.
 - Perubahan rencana dan aplikasi yang sering gangguan juga menjadi faktor penghambat.

Realisasi Pendapatan dan Belanja

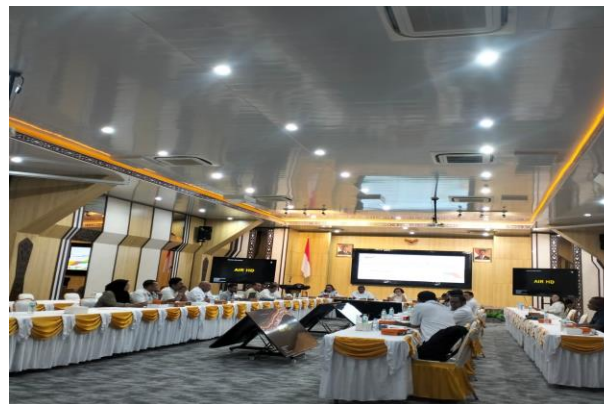
- Pendapatan daerah Provinsi Papua Barat per 19 November adalah sebesar Rp2,087 triliun, dengan persentase 60% dari anggaran Rp3,57 triliun.
 - Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru terealisasi 68,80% dari anggaran Rp334,905 miliar.
 - Pendapatan transfer terealisasi 57,40% dari anggaran Rp3,004 triliun.
 - Pendapatan daerah lainnya terealisasi 100,023% dari anggaran Rp134,923 miliar.
- Realisasi belanja daerah adalah sebesar Rp1,850 triliun, dengan persentase 51,96% dari anggaran Rp3,622 triliun.
 - Belanja operasi terealisasi 54,36% dari anggaran Rp2,987 triliun.
 - Belanja modal terealisasi 51,10% dari anggaran Rp451,178 miliar.
 - Belanja tidak terduga terealisasi 91,998% dari anggaran Rp30 miliar.
 - Belanja transfer terealisasi 46,31% dari anggaran Rp153 miliar.



RAPAT KOORDINASI TEKNIS BP3OKP-RI, PEMDA PROVINSI PAPUA BARAT DAN KANWIL DJPB PAPUA BARAT

Realisasi Dana Khusus

- Realisasi dana perantuan khusus tahun 2025 untuk Otsus dan infrastruktur menunjukkan angka yang bervariasi.
 - Dana Otsus dan infrastruktur baru terealisasi 0,58% dari anggaran Rp1,941 triliun.
 - Dana bagi hasil terealisasi 0,45%, Dana Alokasi Umum (DAU) terealisasi 0,67% dari anggaran Rp427 miliar.
 - Dana Alokasi Khusus (DAK) terealisasi 27,18% dari anggaran Rp11 miliar.
 - Total dana perantuan mencapai 57,40% dari anggaran Rp3 triliun.
- Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Infrastruktur tahun 2025 memiliki rincian sebagai berikut:
 - Otsus 1% Papua terealisasi 75% dari anggaran Rp149,244 miliar.
 - DBH Migas Otsus terealisasi 50% dari anggaran Rp119 miliar.
 - DBH SDAP pengembangan gas alam Papua terealisasi 50% dari anggaran Rp1,175 triliun.
 - Otsus 1,5% Papua terealisasi 75% dari anggaran Rp118,332 miliar.
 - DTI Papua terealisasi 75% dari anggaran Rp349,215 miliar.
 - Total realisasi dana Otsus dan Infrastruktur mencapai 58,67% dari anggaran Rp1,987 triliun.



- Dana bagi hasil (DBH) tahun 2025 terealisasi 44,5%, dengan rincian:
 - Pajak terealisasi 34,5%.
 - Sumber daya alam (SDA) terealisasi 74,99%.
 - Lainnya terealisasi 101% dari anggaran Rp1,099 miliar.
- Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2025:
 - DAU yang tidak ditentukan penggunaannya terealisasi 69,35% dari anggaran Rp444 miliar.
 - DAU yang ditentukan penggunaannya terealisasi 3% dari anggaran Rp22 miliar.
 - Total DAU terealisasi 67,47%.
- DAK Fisik masih 0% terealisasi dari anggaran Rp2,397 miliar, terutama untuk bidang kesehatan.
 - DAK Fisik lainnya terealisasi 33,84% dari anggaran Rp9,025 miliar.
 - Total DAK terealisasi 27,18% dari anggaran Rp13,009 miliar.



RAPAT KOORDINASI TEKNIS ANTARA BP3OKP-RI, PEMDA PROVINSI PAPUA BARAT DAN KANWIL DJPB PAPUA BARAT

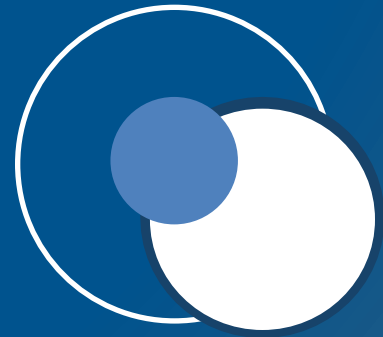
Capaian

Kabupaten Pegunungan Arfak telah menyalurkan hampir seluruh Dana Otsus, tersisa DTI Tahap 3.

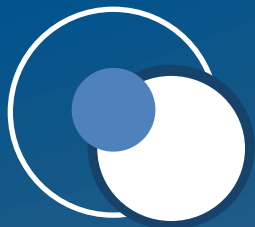


Tindak Lanjut

1. **Penyelarasan Data:** Tim dari Provinsi Papua Barat, khususnya Bapak Sekda, akan mengadakan pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mempertahankan dan menyelaraskan data realisasi anggaran yang akurat.
2. **Penyusunan RKA RAP Otsus 2026:** Perangkat daerah penerima dana Otsus diminta segera menyusun RKA yang akan dievaluasi oleh BAPEDA untuk memastikan belanja sesuai output dan outcome.
3. **Pendampingan Kabupaten:** BP3OKP akan turun ke 7 kabupaten dengan didampingi tim dari provinsi (BAPEDA, Inspektorat, BPKD) dan Kanwil Keuangan DJPB untuk membantu percepatan penyerapan anggaran 2025 dan RAP 2026.
4. **Pembentukan Tim Khusus Otsus:** BP3OKP akan membentuk tim khusus untuk membahas isu-isu terkait dana Otsus, termasuk temuan BPK mengenai dana mahasiswa, untuk mencari solusi yang tepat.
5. **Peningkatan PAD:** Pemerintah daerah harus lebih fokus pada penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan pada TKD, dengan mengoptimalkan sektor pariwisata dan UMKM.
6. **Penyusunan Jadwal Kegiatan:** OPD diharapkan dapat menyusun kerangka acuan kerja (KAK) dan rencana kegiatan dari awal agar proses tender tidak terlambat.
7. **Pengawasan Ketat Inspektorat:** Inspektorat diharapkan dapat melakukan pengawasan secara teratur (mingguan atau bulanan) untuk memastikan pekerjaan tepat sasaran dan mencegah temuan audit.
8. **Dukungan Finansial Inspektorat:** Perlu adanya dukungan finansial yang memadai untuk Inspektorat agar dapat melaksanakan fungsi pengawasan secara optimal.
9. **Sanksi bagi OPD yang Tidak Patuh:** OPD yang tidak patuh terhadap arahan dan kebijakan belanja akan diberikan sanksi sesuai dengan kebijakan penduduk dan daerah.
10. **Edukasi dan Bimbingan Teknis:** Memberikan edukasi dan bimbingan teknis kepada SDM pengelola anggaran di kabupaten dan OPD untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menyusun laporan dan memenuhi syarat salur.
11. **Optimalisasi Penggunaan Dana Otsus:** Memilah item-item penggunaan dana Otsus agar sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan, terutama untuk pemberdayaan orang Papua, pendidikan, dan kesehatan.
12. **Komunikasi dengan APH:** Membangun komunikasi yang baik dengan aparat penegak hukum (APH) terkait laporan masyarakat agar ada koordinasi yang baik dalam penanganan kasus.
13. **Monitoring Dana Transfer Migas Otsus:** Memastikan dana transfer Migas Otsus yang akan cair dapat dieksekusi menjadi kegiatan atau dialokasikan sebagai silpa untuk program prioritas tahun 2026.



TERIMA KASIH





Laporan Pokja Papua Polhukam (Papua Damai)

PERIODE NOVEMBER 2025

Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Provinsi Papua Barat





Kegiatan-Kegiatan Strategis





PENGANTAR

Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Tuhan yang Maha Esa, atas Berkat dan Perkenan-Nya sehingga laporan kerja bulanan Pokja Polhukam pada BP3OKP-RI Perwakilan Provinsi Papua Barat dapat disusun dan selesai sesuai waktu yang ditetapkan.

Laporan bulanan Pokja Polhukam Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggung jawaban atas pencapaian sasaran sinergi selama Bulan November 2025

Laporan ini mendiskripsikan tentang tugas dan fungsi Pokja Papua Polhukam yang terakomodir dalam perencanaan strategis, visi-misi, tujuan dan sasaran kegiatan, kebijakan, program, termasuk permasalahan yang dihadapi dan upaya tindaklanjut pemecahan masalah.

Kami sadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, maka sangat diharapkan adanya saran dan masukan bahkan kritik konstruktif untuk perbaikan laporan lebih lanjut.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua teristimewa kami di jajaran Pokja dan Sekretariat BP3OKP serta setiap pembaca yang mulia.

Manokwari, November 2025

Hormat Kami
Pokja Papua Polhukam

Dr. Ismail Sirfefa, S.Sos.,M.H



RINGKASAN EKSEKUTIF

Tugas dan fungsi Pokok BP3OKP adalah melakukan Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) dengan Kementerian/Lembaga secara vertikal dari pusat sampai daerah termasuk distrik dan kampung. BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Barat berdasarkan Sistem Perencanaan Nasional dan Daerah berperan sebagai **Media Utama** untuk mengarahkan kebijakan pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar sinergi dan serasi dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diatur dalam *Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004*. Dalam pelaksanaan tugas BP3OKP untuk mengawal *Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus di bidang Papua Sehat, Papua Cerdas dan Papua Produktif* sesuai amanat Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) yang diatur dalam Perpres No 24 Tahun 2023, maka tugas Pokja Papua Polhukam selalu mendampingi dan berkoordinasi dengan Papua Sehat, Papua Cerdas dan Papua Produktif terutama mengenai bidang tugas dari ketiga pokja tersebut yang akan bersentuhan dengan masalah hukum dalam mhal ini regulasi daerah (*Perdasus dan Perdasi*), kondisi keamanan dalam pelaksanaan tugas ketiga pokja tersebut, terutama dari ketiga pokja dimaksud berkaitan dengan Pembentukan Kawasan Tentang Kiprah Papua Sehat, Papua Cerdas dan Papua Produktif.

Selama perjalanan pemerintahan dan pembangunan dalam Bulan Agustus Tahun 2025, Pokja Papua Polhukam hanya menitikberatkan pada bidang hukum dan pemerintahan, yaitu mensosialisasikan kebijakan Undang-Undang No 21 Tahun 2021 Pasal 47 tentang Pengawasan Sosial oleh masyarakat terhadap Pelaksanaan Otonomi Khusus, dan Peraturan Pemerintah No 107 Tahun 2021 Pasal 47 yang mengamankan Peran serta Masyarakat dalam Pengawasan Kebijakan Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus. Disisi lain Pokja Papua Polhukam juga terlibat di dalam setiap FGD yang dilakukan oleh pokja lainnya dan menjelaskan kepada pemerintah daerah melalui pimpinan OPD dan masyarakat tentang pentingnya sinergitas dan kerja sama Kementerian/Lembaga Non Kementerian seperti BPKP, BPK, KPK, Kejaksaan, Pemerintah Daerah/APIP, Ombudsman, DPRP/DPRK, Perguruan Tinggi Negeri dan masyarakat sebagai mitra kerja dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap penerimaan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus yang dikoordinir oleh BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Barat

Output daripada kinerja Pokja Papua Polhukam (Papua Damai) Bersama pokja lainnya telah memberikan sumbangan yang berarti bagi peningkatan kualitas

Aparatur Pemerintah Daerah dan masyarakat tentang tata cara penerimaan dan penggunaan dana Otsus. Disisi lain output yang dihasilkan Pokja Papua Polhukam terkait dengan penjelasan materi Bimtek tentang Sinergi Masyarakat dan BP3OKP dalam Pengawasan Dana Otonomi Khusus sangat dipahami oleh kelompok ASN, masyarakat, Dewan Adat, DPRK di beberapa kabupaten sehingga ekspresinya mencerminkan adanya pemahaman dan kepuasan terhadap materi yang disampaikan.

Demikian diskripsi ringkasan eksekutif (eksecitive summary) Pokja Papua Politik, Hukum dan Kemanan (Papua Damai) yang disampaikan untuk diketahui dan di mohon petunjuk lebih lanjut



Pendahuluan

Perpres No 121 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan dan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) terdiri dari 4 (empat) Pokja, yaitu Pokja Papua Sehat, Papua Cerdas Papua Produktif dan Papua Pohukam (Papua Damai). Keempat Pokja tersebut melaksanakan tugas dan fungsi pokok BP3OKP, yaitu Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi dan Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Otonomi Khusus yang bertujuan untuk menghilangkan kesenjangan antar daerah dan kesenjangan sektor demi terwujudnya orang Papua yang sejahtera dan mandiri. Untuk mencapai tujuan Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud, maka BP3OKP melalui kerja-kerja Pokja telah membangun koordinasi dan sinergitas dengan Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dan setiap kabupaten di wilayah kerja Provinsi Papua Barat untuk bersama-sama mendorong proses percepatan pembangunan dan Pelaksanaan Otonomi Khusus sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan aturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah No. 106 Tahun 2021 Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Peraturan Pemerintah No. 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, Dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Berdasarkan peraturan perundang undangan dimaksud maka BP3OKP telah melaksanakan fungsinya dan secara operasional dilakukan oleh setiap kelompok kerja (Pokja) dan melalui kesempatan ini Pokja Papua Polhukam akan menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan tugas Bulan Agustus untuk dijadikan data dan informasi kinerja pelaksanaan Poka Papua Politik, Hukum dan Keamanan untuk penmgambilan kebijakan lebih lanjut.



Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi BP3OKP didasarkan pada Perpres No. 121 Tahun 2022. Khusus untuk tugas pokok dan fungsi Pokja Papua Polhukam, dapat dideskripsikan sebagai berikut :

1. Tugas

- Mendorong semangat Otonomi Khusus melalui pelaksanaan demokrasi yang berkeadilan, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi harkat dan martabat setiap orang dalam pelaksanaan Otonomi Khusus;
- Bersinergi dengan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan **Desentralisasi Asimetris** untuk mewujudkan kekhasan daerah, karakteristik daerah dan kekhususan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan;
- Melaksanakan koordinasi dengan Lembaga terkait di bidang politik, hukum dan keamanan;
- Melaksanakan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyelesaian pelanggaran Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) serta bersama aparat penegak hukum bersinergis dalam penyelesaian sengketa hukum baik dalam pemerintahan dan persengketaan yang berada dalam kehidupan masyarakat;
- Bekerja sama dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam rangka menciptakan stabilitas keamanan dan suasana daerah yang kondusif;
- Melakukan pemantauan dan asesmen terhadap kinerja pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten dalam pelaksanaan Otonomi Khusus;
- Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Kawasan yang disiapkan oleh daerah dalam rangka mendukung percepatan pembangunan Otonomi Khusus terkait dengan Papua Sehat, Papua Cerdas dan Papua Produktif;
- Mendukung dan mendorong harmonisasi sosial demi terwujudnya kebersamaan, harmoni dan toleransi dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan di daerah guna mendukung persatuan dan kesatuan nasional.

2. Fungsi

- Melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terhadap kebijakan program pelaksanaan Otonomi Khusus;
- Melaksanakan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga serta kelembagaan yang berada dalam masyarakat dalam rangka pembinaan dan pengawasan penggunaan dana Otsus bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola dana tersebut;

- Menyampaikan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas Pokja Papua Polhukam kepada Pimpinan BP3OKP untuk diteruskan pada Presiden melalui Wakil Presiden.

3. Analisa Perkembangan Strategik

Dalam pelaksanaan tugas, fungsi pokok Pokja Papua Polhukam, maka pencapaian kinerja yang diharapkan dapat dilakukan melalui analisis perkembangan strategi yang meliputi : bidang politik, hukum dan keamanan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Analisis Situasi Perkembangan Politik

Situasi dinamika perkembangan politik di daerah selama bulan Agustus untuk tujuh kabupaten dan provinsi masih berada pada posisi stabilitas politik yang dinamis mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat khususnya Orang Asli Papua (AOP). Hal inti yang menjadi tuntutan masyarakat Orang asli Papua adalah pemerintah daerah segera melakukan program percepatan pembanguna Otonomi Khusus yang berpihak kepada hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP), melindungi hak masyarakat adat dan mewujudkan hakekat dan tujuan desentralisasi asimetris untuk kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP).

Dalam analisis situasi perkembangan politik kekinian yang dilakukan oleh masyarakat dan mahasiswa di daerah merupakan wujud ekspresi merasa ketidakpuasan terhadap pemerintah bahkan justru terjadi ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan pemerintah daerah (*distrust public*) disebabkan karena pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota sangat lambat dan kurang anggap terhadap proses percepatan pembangunan Otonomi Khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) sehingga berimplikasi terhadap masalah politik di daerah karena dinilai akan terjadi permasalahan sebagaimana yang dialami dalam pelaksanaan Otsus 20 tahun lalu di Tanah Papua.

Bahwa analisis indikasi kegagalan Otsus dapat diukur berdasarkan kondisi objektif bahwa semestinya pelaksanaan otsus 2021 sudah harus berjalan sebagaimana diharapkan, namun dalam tataran pelaksanaannya sampai saat ini tahun 2025 Otonomi Khusus belum dilakukan sebagaimana mestinya dan dinilai masih dalam tataran retorika politik dan stagnasi karena perencanaan pembangunan daerah belum terlaksana sebagaimana diharapkan.

Untuk demokrasi politik yang berkembang di Manokwari Provinsi Papua Barat merupakan resonansi politik yang berkembang dari Kota Sorong terutama kegiatan politik yang dinilai masih perlu dilakukan tindakan untuk mendiagnosis akar permasalahan melalui pendekatan keamanan yang humanis (*humanis security approach*) dan pendekatan hukum yang berkeadilan.

b. Analisis Situasi Perkembangan Hukum

Dalam analisis situasi perkembangan hukum ditemukan bahwa kurangnya aparat penegak hukum dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan edukasi serta sosialisasi tentang kesadaran hukum (*keadilannya*) bagi seluruh elemen masyarakat termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dengan minimnya pembinaan dan edukasi serta sosialisasi hukum yang terbatas di kalangan masyarakat akar rumput (*grass root people*) membuat kesadaran masyarakat terhadap hukum sangat terbatas sehingga cenderung melakukan penyimpangan (*deviasi*) dan patlogi sosial. Dalam konteks tersebut diharapkan adanya pembinaan secara kolaboratif antar aparat keamanan, aparat hukum, elemen masyarakat dan BP3OKP.

c. Analisis Situasi Perkembangan Keamanan

Beberapa langkah dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan instansi terkait melalui Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam prespektif keamanan masih bersifat temporer dan situasional. Semestinya ada forum dialog yang dilakukan pemerintah daerah untuk melibatkan forkopimda dalam dialog yang dijadwalkan secara periodik untuk membangun kesadaran masyarakat dibidang keamanan demi memperkuat ketahanan daerah yang merupakan bagian integral dalam ketahanan nasional demi terselenggaranya proses pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Diharapkan pendekatan keamanan lebih bersifat humanis (*humanitty security approace*) yang diwujudkan dalam pembinaan yang bersifat operasional seperti kegiatan Pendidikan, Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat agar ada rasa tanggung jawab masyarakat untuk terlibat dan berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan di lingkungan dan daerah secara kondusif dan berkelanjutan.

Rencana Strategik

Rencanan strategik pelaksanaan Otonomim Khusus yang diatur dalam RPJMD yang bersinergis dengan RPJMN merupakan strategi pembangunan daerah untuk mewujudkan orang Papua yang sehat, orang Papua yang pintar dan orang Papua yang dapat memenuhi kebutuhan ekonomi melalui 3 program rencana strategis percepatan pembangunan Papua, yaitu : Papua Sehat, Papua Cerdas dan Papua Produktif yang secara strategi dilakukan oleh BP3OKP melalui Pokja Papua Papua Sehat, Papua Cerdas dan Papua Produktif serta Pokja Papua Polhukam.

Dalam konteks rencana strategik Pokja Papua Polhukam, adalah bersinergi dengan Pokja lainnya dalam pelaksanaan tugas yang kolaboratif dan koordinatif dalam rangka mewujudkan perdamaian yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Papua Barat.

Kegiatan Strategis Bersama

Selasa, November 2025 bertempat di Aula Kasuari Lantai III Gedung Keuangan Negara (GKN) Manokwari, Provinsi Papua Barat dilaksanakan Rapat Pleno antara BP3OKP-RI se-Tanah Papua yang beranggotakan 6 (enam) orang dengan Komite Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang beranggotakan 9 (sembilan) orang yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Raka Bumi Raka selaku Ketua BP3OKP-RI. Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Ibu Ribka Haluk Bersama Gubernur Provinsi Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, M.Si. Dalam pertemuan tersebut Wakil Presiden Republik Indonesia menekankan bahwa kedua Lembaga Otsus yang dibentuk agar bisa mempercepat akselerasi pembangunan di Papua. Selain itu Wapre RI juga menekankan bahwa inovasi dalam kebijakan perlu digenjut dua kali lipat. Manfaat yang diterima masyarakat harus dua kali lipat. Mengingat pembangunan di Papua mesti berkelanjutan sehingga tidak bisa pembangunan hanya 1 atau 2 tahun. Ia menambahkan pentingnya data di lapangan sehingga membantu para pemangku kebijakan membuat program sesuai dengan apa yang diperuntukannya. Dalam pemaparannya Wapre RI menyinggung program Papua Sehat untuk membangun rumah sakit sehingga tidak lagi pasien mendapat rujukan ke Makassar untuk mendapatkan perawatan. Dibidang Pendidikan (Papua Cerdas) ia menambahkan agar Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi prioritas Pemerintah Pusat dan daerah. Bidang Papua Produktif yaitu angka pengangguran terbuka inflasi harus menjadi perhatian. Dari semua data yang ditampilkan, Wapres berharap harus ada prioritas agar anggaran daerah bisa diperuntukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan yang penting tepat sasaran arah penggunaannya.

Dalam kegiatan strategis Bersama antara Wakil Presiden Republik Indonesia, BP3OKP, Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua, dan didampingi Gubernur Provinsi Papua Barat membahas tentang strategi percepatan pembangunan dan Otonomi Khusus dibidang Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi untuk mensejahterakan Orang Asli Papua. Langkah kongkrit yang disepakati adalah daerah harus menyediakan satu wadah ekonomi yang dipimpin oleh Putra Asli Papua untuk mengakomodir aspirasi pengusaha asli Papua dalam mewujudkan pemberdayaan ekonomi dengan harapan jika ekonomi Orang Asli Papua terpenuhi secara baik dan mandiri akan berdampak terhadap stabilitas kondusif dan keamanan daerah.



Rabu, 12 November 2025 bertempat di Aula Kasuari Lantai III GKN, Manokwari Provinsi Papua Barat, telah dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema : Pengembangan Ekonomi Orang Asli Papua (OAP) melalui program Papua Produktif. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh BP3OKP-RI Papua Barat Pokja Papua produktif dengan menghadirkan peserta yang berasal dari Bank Indonesia, Bank Papua, BRI, Mandiri, para kontraktor di Papua Barat, Komunitas Pertanian, perikanan, Badan Pusat Statistik (BPS) LSM serta beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Turut hadir Perwakilan Gubernur Provinsi Papua Barat, Tenaga Ahli Gubernur bidang Ekonomi dan Pembangunan Bapak Marthen Khocu.

Kegiatan tersebut diawali dengan sambutan Anggota BP3OKP-RI Perwakilan Provinsi Papua Barat, Irene Manibuy, S.H.,M.Kn. dalam sambutannya ia berharap bahwa harus pentingnya kolaborasi antar semua stakeholder serta seluruh lapisan elemen baik, LSM, Komunitas, Lembaga-lembaga maupun pemerintah untuk memberikan perhatian serius bagi perekonomian di Provinsi Papua Barat khususnya pengembangan ekonomi Orang Asli Papua (OAP).

Dokument Rencana Aksi Percepatana Pembangunan Papua (RAPPP) akan segera diresmikan (ditandatangani) maupun oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, sebagaimana yang rencananya akan dilaksanakan di Kota Jayapura, Provinsi Papua sekaligus meresmikan Rumah Sakit yang saat ini sudah dibangun.

Sambutan selanjutnya juga disampaikan oleh Kepala Sekretariat BP3POKP-RI Papua Barat, Mohammad Khobir juga menyampaikan APBN hadir di Papua Barat sebesar 40 Triliun rupiah sebagai ekonomi viskal yang setiap rupiahnya bisa bermanfaat bagi masyarakat Papua Barat khususnya Orang Asli Papua. Sebagai kapasitas sekretariat menjamin jembatan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah guna memudahkan pembangunan dengan berprinsip Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif dan Papua Damai. Kami berharap bahwa Orang Asli Papua dapat menjadi pelaku utama pengusaha baik dibidang ekonomi, pertanian, pelatihan literasi ekonomi dan lain sebagainya.

Sambutan tenaga ahli Gubernur bidang ekonomi dan pembangunan Provinsi Papua Barat. Ia menyatakan bahwa kegiatan FGD merupakan tindak lanjut dari kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia. Ia menambahkan kunjungan Wakil Presiden bukan hanya sebatas kunjungan biasa, lebih dari itu Wakil Presiden turun langsung dilapangan guna melihat secara langsung pengembangan perekonomian di kalangan masyarakat khususnya ekonomi mkemaslahatan bagi Orang Asli Papua (OAP). Hanya dengan sinergi yang kuat kita dapat mengembangkan potensi SDA dan SDM yang sejahtera dan bermartabat bagi masyarakat Papua Barat khususnya Bagi Orang Asli Papua (OAP).

Moderator Pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD) dipimpin oleh Dr. Ismail Sirfefa, S.Sos.,MH. Hadir sebagai Narasumber Plt. Kepala Bappeda Provinsi Papua Barat serta Perwakilan Bank Indonesia selanjutnya dilanjutkan sesi diskusi dari berbagai pelaku Usaha seperti Pelakuk Usaha Kopi dari Pegunungan Arfak, DPR Otsus Papua Barat, MRP Papua Barat, KOAL OAP, Usaha Perkebunan Cokelat, Organisasi Nelayan, Komunitas dan lain-lain.



Pelaksanaan Lokakarya dengan Judul, startegi Pencapaian dan Indikator Pembangunan Papua Sehat, Papua Cerdas dan Papua Produktif. Atas kerja sama Bappeda Provinsi Papua Barat, BP3OKP dan Bappeda Kabupaten se-Propinsi Papua Barat dalam rangka mengkoordinasikan dan mengsinkronisasikan sinergitas antara Bappeda dan BP3OKP dalam rangka melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap OPD pengampuh di Provinsi maupun di Kabupaten dengan cara untuk mendorong agar daerah dapat memahami system penggunaan anggaran dan pelaporannya yang lebih diarahkan pada system Interprobabilitas.

Dalam diskusi tersebut Bappeda Provinsi Papua Barat mengharapkan adanya kerja sama secara sinergis antara Bappeda dan BP3OKP untuk melihat secara dekat dinamika perkembangan daerah yang telah memenuhi syarat salur serta telah menyusun Rancangan Anggaran Pembangunan (RAP) tahun 2026 sebagai materi diskusi yang akan dilakukan secara DESK BP3OKP.



Dalam Rangka Menghadiri Musywarah Daerah (MUSDA) III Keluarga Besar Suku Irarutu Kab. Kaimana, diminta oleh panitia Penyelenggara agar BP3OKP melalui Pokja Papua Cerdas, Papua Produktif, Papua Polhukam untuk memberikan arahan terkait dengan Peran Masyarakat Adat dalam pengawasan dana Otonomim Khusus di daerah. Terutama pemanfaatan Dana Otusus untuk menunjang bidang Pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD)-Perguruan Tinggi (PT).

Dalam kegiatan dialog antar masyarakat Suku Irarutu dengan Pokja BP3OKP Papua Barat diminta oleh masyarakat agar alokasi Dana Otsus bagi masyarakat adat yang ditunjang dari Dana Alokasi Umum (DAU) 10% dan Dana Bagi hasil (DBH) Migas 1% agar Pemerintah daerah Provinsi dapat membuat Peraturan Gubernur agar Pengalokasiannya kepada masyarakat 8 Suku di Kabupaten Kaimana dan Dewan Adat Kabupaten Kaimana dapat menerima dan menikmati dana tersebut untuk kepentingan pengembangan peran dan tanggung jawab masyarakat Suku-Suku yang terhimpun dalam Dewan Adat Kabupaten Kaimana.

Dalam pelaksanaan Pemilihan Ketua Ikatan Keluarga Besar Suku Irarutu, yang mendapatkan suara terbanyak adalah saudara Petrus Mangku, S.IP salah satu ASN pada Bappeda Kabupaten Kaimana yang berkomitmen untuk menjadikan masyarakat Suku Irarutu sebagai mitra Pemerintah Daerah untuk bersinergis dalam mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Kaimana.

Penyampaian harapan dari Pokja Papua Polhukam, BP3OKP Provinsi Papua Barat yang disampaikan Dr. Ismail Sirfefa, S.Sos.,M.H bahwa masyarakat Suku Irarutu Bersama Dewan Adat Kabupaten Kaimana harus menjaga stabilitas keamanan dan ketahanan daerah agar pelaksanaan percepatan pembangunan Otonomi Khusus di daerah dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna demi meningkatkan kesejahteraan bagi Orang Asli PaPUA (OAP) Kabupaten Kaimana.



Kegiatan Asesment, Pemantauan dan Evaluasi kinerja daerah tentang syarat salur dan permintaan dokument Rencana Anggaran Pembangunan (RAP) tahun 2026 kepada kepala Bappeda Kabupaten Kaimana yang diwakili Kasubid Data dan Evaluasi, beliau menyampaikan bahwa mekanisme kerja dari masing-masing OPD kurang lancar dan bertanggung jawab terhadap penggunaan dana Otsus menyebabkan terjadinya hambatan kerja dari Bappeda sebagai coordinator pembangunan di daerah dalam menginput dinamika perkembangan penggunaan dana Otsus beserta syarat salur yang harus dilakukan di tahap kedua dan ketiga sebelum akhir tahunan anggaran 2025. Dalam pertemuan antar Pokja BP3OKP Bersama Bappeda dilaporkan bahwa keterlambatan penyampaian syarat salur dari Bappeda Kabupaten Kaimana kepada Bappeda Provinsi Papua Barat disebabkan karena beberapa hal diantaranya, :

- Mentalitas Aparatur Pengelola yang menggunakan Dana Otsus yang kurang konsisten dan akuntabel;
- Budaya dan etos kerja Aparatur Pengelola Dana Otsus yang masih kental membentuk atau menjadi ketidak disiplin yang berdampak terhadap kinerja dan laporan penggunaan dana Otsus;

Dari kedua permasalahan tersebut maka diminta oleh Kasubag Data dan Evaluasi dana Otsus pada Bappeda kabupaten Kaimana bahwa jika ada kesempatan dalam tahun 2026, maka Bappeda Kabupaten Kaimana akan mengundang BP3OKP untuk melakukan Sosialisasi dan Bimbingan Tekhnik (Bimtek) kepada semua OPD pengampuh tentang disiplin pelaporan anggaran dengan metode Intraprobabilitas.



Kegiatan Asesment, Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Penggunaan Dana Otsus yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kaimana, yang mana dijelaskan oleh Kepala Bidang Anggaran dan Kepala Bidang Keuangan yang menangani Dana Otsus bahwa keterlambatan syarat salur dikarenakan OPD pengampuh dana Otsus belum menyampaikan laporan Dokumen Penggunaan Dana Otsus kepada Bappeda dan BPKAD Kabupaten Kaimana agar dilaporkan secara kolektif kepada Bappeda dan BPKAD Provinsi Papua Barat.

Dalam konteks tersebut, maka Bappeda dan BPKAD Kabupaten Kaimana mengharapkan agar Bappeda dan BPKAD Provinsi Papua Barat Bersama BP3OKP untuk melakukan pendampingan, edukasi dan advokasi terhadap OPD pengampuh didaerah agar administrasi laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Otsus bagi setiap OPD pengampuh dapat terlaksana sesuai batas waktu yang telah ditentukan, dan diharapkan adanya kolaborasi dan koordinasi antar provinsi dan kabupaten untuk memberikan *keyword* dan *punismen* kepada OPD yang berprestasi dan OPD yang tidak berprestasi.

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi BP3OKP pada OPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana ditemukan bahwa etos dan budaya kerja ASN masih sangat lemah, hal ini dapat dibuktikan dengan pemantauan Anggota BP3OKP di beberapa OPD bahwa rata-rata setiap pegawai yang masuk kantor itu disekitar jam 10.00 WIT-11.00 WIT. Hal ini menunjukan secara nyata bahwa *soft skill* yang mencakup disiplin, kepatuhan terhadap aturan, mentalitas ASN serta semangat *exprite decops* (semangat persatuan) ASN harus diperbaiki dan ditingkatkan melalui Tata Kelola Pembinaan dan Pengembangan Pegawai di daerah.

Koordinasi BP3OKP melalui Pokja Papua cerdas dan Pokja Papua Polhukam bersama Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kaimana, Ibu Herlin Ubery. Dalam kordinasi tersebut membahas permasalahan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kaimana, terutama menyangkut Budidaya Perikanan Darat dan Perikanan Laut tetapi juga Budidaya Rumput Laut yang akhir-akhir ini menjadi minat kerja para nelayan karena harga dipasar semakin meningkat.

Namun dalam tataran pelaksanaannya terdapat tumpang tindih regulasi baik Peraturan Pemerintah (PP), Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) serta belum tersedia dan berfungsinya Peran Provinsi dan Kabupaten yang mengatur tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Potensi Kelautan dan Perikanan. Permasalahan inti yang menonjol adalah bahwa kebijakan kelautan diatur oleh Perda Provinsi Papua Barat sedangkan Perikanan diatur dalam Perda Kabupaten Kaimana. Secara logika hukum bahwa Kelautan dan Perikanan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara laut dan ikan.

Dalam konteks tersebut maka diharapkan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan agar Pemda Provinsi Papua Barat dapat membuat kebijakan untuk memproteksi hak-hak masyarakat adat di Laut dengan regulasi atau Produk hukum Daerah dalam hal ini Perdasi tentang pemanfaatan Sumber Daya Laut dan Ikan Bagi Orang Asli Papua (OAP), agar Perdasi tersebut dapat ditindaklanjuti oleh Kabupaten Kaimana dalam pemanfaatan Sumber Daya Laut dan Perikanan di daerah untuk kesejahteraan masyarakat terutama Orang Asli Papua (OAP). Khusus tentang Undang-Undang Perikanan yang merupakan Undang-Undang sektoral (*Lex Specialis*) disarankan masyarakat nelayan agar dicabut karena masyarakat nelayan khususnya masyarakat adat menghendaki adanya perdasi yang menjabarkan substansi Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan.





Kegiatan pemantauan terhadap kondisi stabilitas keamanan di Kampung Lobo dan Kampung lainnya yang berbatasan dengan beberapa kampung pedalaman Wasior-Teluk Wondama menjelang pelaksanaan aksi oknum-oknum tertentu pada Tanggal 01 Desember 2025. Dari hasil pemantauan dan evaluasi diperoleh informasi melalui wawancara Anggota Pokja Polhukam BP3OKP, Dr. Ismail Sirfeffa, S.Sos.,M.H diperoleh informssi dari akomandan babinsa dan Kapolpos Kampung Lobo bahwa Kondisi Keamanan di Kawasan Teluk Triton yang merupakan objek Wisata Bahari dan kampung Lobo serta kampung-kampung lainnya di Kawasan Teluk Triton berada pada kondisi stabil dan aman dan tidak termakan isu dengan gerakan yang menyuarakan Papua Merdeka pada Tanggal 01 Desember 2025.

Menurut Komanda Babinsa bahwa kurang lebih 10 tahun bertugas di kampung Lobo dan sekitarnya memang pernah ada Tindakan-tindakan dari luar yang menghasut masyarakat setempat untuk melakukan Latihan perang-perangan, namun ketika informasi tersebut disampaikan kepada Dandim XVIII Yambah Bawa, Kaimana beberapa tahun lalu juga diberikan pembinaan terhadap masyarakat sehingga merek sadar bahwa mereka adalah bagian integral warga negara Indonesia. Mereka adalah keluarga besar Suku Mairasi dari Kabupaten Kaimana yang memiliki hubungan kekerabatan dengan suku Mairasi di kampung Obo dan Naigere Wasior, Kabupaten Teluk Wondama sehingga kadang kala ada isu-isu negative yang mempengaruhi masyarakat yang berada di kedua kampung tersebut.



Dalam konteks ini diharapkan oleh masyarakat setempat agar ada pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara kepada mereka masyarakat Suku Mairasi agar mereka dapat memahami eksistensi mereka sebagai warga Negara Indonesai yang baik dan tidak terpengaruh terhadap isu-isu negative yang dapat memecah bela persatuan dan kesatuan serta merongrong kewibawaan daerah dan negara. Disisi lain berdasarkan himbauan dan arahan anggota Pokja Polhukam BP3OKP terkait kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan fisik di kampung Lobo diarahkan agar masyarakat tidak membangun rumah dibawah ***Gunung Emansiri*** karena akan merusak ekosistem dan mengurangi daya tahan gunung yang dikhawatirkan terjadinya pematahan (longsor) yang mengakibatkan korban jiwa. Kami dari anggota Pokja Papua Polhukam juga menghimbau agar disepanjang kaki gunung Emansiri dapat dilakukan reboisasi dan Kawasan Lindung guna menjaga kenyamanan dan keamanan lingkungan sekaligus merupakan destinasi lingkungan hijau sebagai objek penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Hal tersebut direspon Wakil Bupati Kabupaten Kaimana, Isak waryensi, S.Sos dan mengharapkan agar Pemerintah daerah kabuoaten Kaimana dapat mengalokasikan dana pada APBD tahun 2026 untuk pendataan tentang alam di Kawasan kaki gunung Emansiri, Lobo.



Untuk menunjang Prakarsa Pemerintah Daerah tentang pembangunan SMK Pariwisat Teluk Triton di Kampung Lobo, maka Wakil Bupati Kabupaten Kaimana meminta bantuan BP3OPKP untuk melakukan survei lokasi pembangunan Sekolah Pariwisata dimaksud. Adapun luas lokasi yang disediakan oleh masyarakat adat setempat seluas 3 ha untuk pembangunan Gedung Sekolah SMK Pariwisata, Laboratorium praktek dan fasilitas prasarana lainnya dalam rangka pengembangan Pendidikan Pariwisata di Teluk Triton, Kampung Lobo-Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana.

Rencana pembangunan Gedung SMK Pariwisata tersebut merupakan kerinduan masyarakat Lobo yang terlalu lama, namun mereka tidak bisa mengungkapkan hal tersebut kepada pemerintah daerah sebab pada umumnya mereka minim dalam Pendidikan dan pengetahuan sehingga mengharapkan anak-anak merekalah yang dapat memperjuangkan kerinduan itu. Setelah Isak Waryensi terpilih sebagai Wakil Bupati Kabupaten Kaimana untuk masa Bhakti Tahun 2024-2029, maka kerinduan tersebut terungkap dengan harapan anak mereka yang notabennye sebagai Wakil Bupati Kabupaten Kaimana dapat memperjuangkan berdirinya SMK Pariwisata Teluk Triton di Lobo agar anak-anak mereka dapat mengenyam Pendidikan Parwisayta dengan baik dan bisa bersekolah untuk selanjutnya mereka akan berusaha di dunia Pariwisata guna memperbaiki arah hidup dan kesejahteraannya.

Prakarsa pemerintah daerah tentang pembangunan SMK Pariwisata dimaksud diharapkan adanya dukungan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan (BPP) untuk mendorong terbangunnya Sekolah SMK Pariwisata dalam waktu yang tidak terlalu lama sehingga pemerintah daerah mengharapkan agar pembangunan SMK Pariwisata dapat dilakukan di tahun 2026 yang dibangun dari sumber APBD Kabaupaten Kaimana tetapi juga mengharapkan bantuan biaya pembangunan SMK dimaksud yang dorong dari APBD Provinsi Papua Barat dan APBN Pemerintah Pusat pada tahun 2025.



Setelah pemerintah daerah, BP3OKP dan masyarakat Lobo melakukan survei lokasi pembangunan SMK Pariwisata Teluk Triton, maka wakil Bupati Kabupaten Kaimana meminta Kepada BP3OKP melalui perwakilan Pokja Papua Cerdas, Eddy Wambrau, S.Pi.,M.Si dan Perwakilan Pokja Papua Polhukam, Dr. Ismail Sirfefa, S.Sos.,M.H untuk melakukan pencerahan, pengarahan dan edukasi tentang ***Hakekat dan Tujuan Pembangunan SMK Pariwisata Teluk Trirton*** serta Pengarahan BP3OKP kepada masyarakat kampung Lobo tentang Kebijakan pemerintah pusat tentang Pengembangan Pariwisata Rintisan di Teluk Triton. Dalam pengarahan Anggota Pokjan Papua Polhukam (Papua Damai) dan Anggota Pokja Papua Cerdas yang didampingi Wakil Bupati Kaimana dan dipandu oleh Komanda Babinsa sangat menarik perhatian dan antusias masyarakat dan mengharapkan percepatan pembangunan SMK Pariwisata Teluk Triton di kampung Lobo agar mereka bisa menyekolahkan anak-anak mereka di SMK Pariwisata dimaksud.

Dalam diskusi pada saat pertemuan dimaksud mantan Ketua RT di Kampung Lobo menghimbau dan mengharapkan konsistensi dari Pemerintah Daerah terhadap rencana pembangunan sekolah dimaksud karena masyarakat adat setempat telah rela memberika sebidang tanah yang luasnya mencapai 3 ha untuk pembangunan Sekolah SMK Pariwisat Teluk Triton. Harapan kedua dari mantan ketua RT Lobo mewakili seluruh Suku Mairasi dan sekitarnya agar pemberian alokasi dana Otsus untuk masyarakat adat dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel agar masyarakat adat dapat menggunakan dana tersebut dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat setempat dan juga untuk kepentingan pelestarian nilai-nilai adat dan budaya.



Kegiatan-Kegiatan Strategis



Pada Bulan November Tahun 2025, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Provinsi Papua Barat mencatat sejumlah capaian kinerja strategis melalui pelaksanaan fungsi SHEK (Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi dan Koordinasi), khususnya dalam penguatan perencanaan daerah, koordinasi strategis sesuai misi percepatan pembangunan, serta pengawasan dan harmonisasi lintas sektor dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Beberapa capaian BP3OKP Provinsi Papua Barat pada Bulan November 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perbaikan Tata Kelola dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) baik Pendidikan dan kesehatan maupun perbaikan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Papua Barat dan selalu menjaga keseimbangan dan keberlanjutan pembangunan Otonomi Khusus (Otsus).
2. Melalui FGD dimaksud maka capaian yang diperoleh adalah adanya keseragaman pemahaman terhadap strategi pengembangan ekonomi daerah melalui pembinaan dan pemberdayaan UMKM yang didukung oleh pihak perbankan baik BNI, BI, Bank Papua, BRI, Mandiri maupun Lembaga ekonomim lainnya.
3. Berdasarkan materi yang disampaikan BP3OKP dan Bappeda Provinsi Papua Barat, maka capaian yang diinginkan adalah keterpaduan kerja antara kedua Lembaga, yaitu Bappeda dan BP3OKP untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan terkait dengan pengawalan dan pendampingan terpadu terhadap OPD pengampuh atau pengelola Dana Otsus agar outputnya dapat bermanfaat secara berdaya guna dan berhasil guna demi meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP).
4. Dalam proses musyawarah Masyarakat Adat dalam hal ini Ikatan Keluarga Besar Suku Irarutu, maka capaian yang dikehendaki adalah kelembagaan masyarakat adat Suku Irarutu memahami hakekat dari oada kelembagaan adatnya yaitu mengatur dan mengurus agar Anggota masyarakatnya dapat tertib, teratur, aman, damai, Bahagia dan sejahtera, disamping oada hakekat maka kelembagaan adat Suku Irarutu juga diinginkan dapat mencapai fungsi pokoknya yaitu :
 - Mengatur dan mengurus agar masyarakat adat dapat memenuhi kebutuhan pokok, yaitu jasmani dan rohani
 - Capaian yang diinginkan juga bahwa kelembagaan adat tersebut dapat menghimpun seluruh entitas kultural dari persekutuan masyarakat adat Irarutu untuk hidup bersama dalam wadah Ikatan keluarga Besar Suku Irarutu
 - Capaian akhir yang diinginkan adalah kelembagaan adat Irarutu harus berperan melakukan system pengendalian sosial (Sosial Control) terhadap masyarakatnya dalam arti luas, artinya bahwa jika kepengurusan Lembaga adat Suku Irarutu ada yang bersalah maka anggota masyarakat suku dapat memberikan teguran dan perbaikan tata kerja dalam Lembaga adat berdasarkan adat istiadat.

5. Harapan dan capaian yang diinginkan adalah perbaikan Tata Kelola Kinerja aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana dan Pemberian sanksi terhadap ASN yang dinilai etos kerjanya rendah dan tidak konsisten dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kedudukannya agar dengan demikian ada kesadaran bagi ASN dapat memperbaiki tugas pekerjaannya demi peningkatan prestasi dan kinerja kepegawaian.
6. Dalam konteks tersebut maka pencapaian yang saat ini belum memadai dapat diperbaiki melalui Tata Kelola Pemerintahan secara terintegrasi dari kedua Lembaga tersebut agar pencapaian kedepan dapat terlaksana secara inklusif, berkelanjutan, dan dinamis.
7. Dari uraian tersebut, maka pencapaian yang bisa diperoleh adalah perbaikan manajemen Tata Kelola terutama menyangkut Perencanaan sampai pada pengawasan dan evaluasi terutama tentang segmentasi kewenangan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan serta yang diinginkan dicapai adalah pengembalian kewenangan Kelautan dan Perikanan ditangani langsung oleh daerah provinsi dan kabupaten. Dengan demikian maka diharapkan adanya regulasi daerah dalam bentuk perda yang aspiratif dan akomodatif.
8. Dalam diskusi Bersama Komanda Babinsa dan kapolpos di kampung Lobo Distrik Kaimana, maka capaian yang diinginkan adalah terwujudnya stabilitas keamanan dan terlaksananya ketentraman dan ketertiban demi terlaksananya pembangunan Otonomi Khusus (Otsus).
9. Dari hasil survei dan diskusi masyarakat Kampung Lobo Distrik Kaimana Bersama BP3OKP yang didampingi Wakil Bupati Kaimana (Isak Waryensi, S.Sos) menggambarkan bahwa capaian dari kerja sama BP3OKP dan Pemerintah Kabupaten Kaimana sama-sama mendorong terbentuknya SMK Pariwisata Teluk Triton, Kampung Lobo Distrik Kaimana dibangun tahun 2026 yang dibiayai dari APBN, APBD Provinsi dan APBD kabupaten tahun 2026.



Kegiatan-Kegiatan Strategis





REKOMENDASI UMUM

Rekomendasi umu berdasarkan capaian antara lain, yaitu Dari 9 jenis item laporan yang disampaikan maka diharapkan adanya kerja sama seluruh Kementerian/Lembaga dan OPD di daerah secara terkoordinasi, terintegrasi, tersinkronisasi dan tersimplifikasi agar pelaksanaan dari 9 item pencapaian dapat menghasilkan kebijakan dan program kerja yang bisa dilakukan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama Orang Asli Papua (OAP).

Kegiatan-Kegiatan Strategis

Demikian penyampaian Laporan bulanan untuk Bulan November 2025 Pokja Papua Polhukam pada BP3OKP-RI Perwakilan Provinsi Papua Barat untuk diketahui dengan harapan adanya respon, petunjuk dan kebijakan lebih lanjut guna pengembangan tugas dan fungsi Pokja Papua Polhukam yang lebih baik serta berimplikasi terhadap program Papua Damai khususnya di Provinsi Papua Barat yang bermartabat, berkeadilan, dan berkelanjutan.



POKJA Papua Cerdas

LAPORAN BULANAN

NOVEMBER 2025

Sekretariat BADAN PENGARAH PA



| 2025



CAPAIN KINERJA PEMBANGUNAN PAPUA CERDAS – PAPUA BARAT, 2025

INDIKATOR KUNCI PILAR PAPUA CERDAS

Harapan Lama Sekolah (tahun)

▲ **13,17**

Baseline (2021): 13,21

Target (2041) : 14,59 – 16,61

Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)

▲ **7,86**

Baseline (2021): 7,84

Target (2041) : 9,36 – 10,37

Sumber Data: RIPPP & BPS, 2025

KEGIATAN STRATEGIS-1

Dokumentasi Kegiatan Strategis #1



Peserta Diskusi:

- Dinas Pendidikan
- BPKAD
- Bappedalitbang
- Manajemen Petro-Tekno
- BPP/BP3OKP Perwakilan PB

Photo: Rapat Koordinasi Akselerasi Penyerapan DOK dan Monitoring Lembaga Pelatihan Vokasi Petrotekno

Bintuni, 23-28 November 2025, BPP RI Perwakilan Papua Barat melalui POKJA Papua Cerdas melakukan Perjalanan Dinas ke Kabupaten Teluk Bintuni. Tujuan perjalanan yaitu melaksanakan Fungsi SHEK (1) Akselerasi penyerapan anggaran DOK dan Penyusunan RAP, (2) Koordinasi dan Komunikasi rencana Pembangunan Sekolah Rakyat, (3) Koordinasi dan Komunikasi lembaga pelatihan vokasi Petro-tekno. Catatan penting hasil kunjungan lapangan di Kabupaten Teluk Bintuni, diantaranya::

- Kesiapan lahan yang clean dan clear, Pemerintah Daerah Kabupaten siap untuk mempersiapkan syaratnya. Buktinya, telah disampaikan surat permohonan ke Kementerian Sosial.
- Sampai dengan akhir November 2025, penyerapan belanja DOK telah mencapai 75%. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten tetap konsisten untuk menyiapkan syarat salur untuk memenuhi termin III tahun fiskal.
- Petro-tekno telah menghasilkan 1200 lulusan dan informasinya, telah terserap lebih dari 50 persen yang bekerja di LNG Tangguh.
- Terdapat banyak lulusan yang tidak terserap di DUDI, dikarenakan faktor belum optimalnya hard skill serta masih rendahnya soft skill

CAPAIN KINERJA PEMBANGUNAN PAPUA CERDAS – PAPUA BARAT, 2025

INDIKATOR KUNCI PILAR PAPUA CERDAS

Harapan Lama Sekolah (tahun)

▲ **13,17**

Baseline (2021): 13,21

Target (2041) : 14,59 – 16,61

Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)

▲ **7,86**

Baseline (2021): 7,84

Target (2041) : : 9,36 – 10,37

Sumber Data: RIPP & BPS, 2025

KEGIATAN STRATEGIS-2

Dokumentasi Kegiatan Strategis #2



Peserta Diskusi:

- Dinas Pendidikan
- BPKAD
- Bappedalitbang
- BPP/BP3OKP Perwakilan PB

Photo: Koordinasi dan Komunikasi Peningkatan Penyerapan DOK bersama BPKAD dan Bappedalitbang Kabupaten Kaimana

Kaimana, 25-29 November 2025, BPP RI Perwakilan Papua Barat melalui POKJA Papua Cerdas melakukan Perjalanan Dinas ke Kabupaten Kaimana. Tujuan perjalanan yaitu melaksanakan Fungsi SHEK (1) Komunikasi dan Koordinasi Pendirian SMK Pariwisata atau Sekolah Vokasi, (2) Komunikasi pengembangan program Pariwisata Rintisan, (3) Akselerasi Percepatan Belanja DOK dan Penyusunan RAP Tahun 2026. Beberapa konsensus yang dihasilkan dari perjalanan dinas yaitu:

- Per 14 November 2025, penyerapan TKD DOB (Block Grant dan Specific Grant) telah mencapai 75 persen. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Kaimana, saat ini telah melakukan konsolidasi untuk pemenuhan syarat salurguna memenuhi syarat termin III dari TKD DOK.
- Pemerintah Kabupaten Kaimana, saat ini sedang berproses untuk penemuan syarat salur termin III TKD dalam rangka melaksanakan Otsus. Memastikan proses pemenuhan syarat salur termin III tahun fiskal 2025 berjalan sesuai jadwal, maka TAPD terus memantau kemajuan proses asistensi RAP
- Pemerintah Kabupaten Kaimana berkomitmen penuh untuk pendirian SMK Pariwisata, guna menjawab kebutuhan pasar kerja di sektor pariwisata menuju Pengembangan Pariwisata Rintisan, sebagai opsi penerimaan PAD, guna mengurangi beban fiskal daerah.

CAPAIN KINERJA PEMBANGUNAN PAPUA CERDAS – PAPUA BARAT, 2025

INDIKATOR KUNCI PILAR PAPUA CERDAS

Harapan Lama Sekolah (tahun)

▲ **13,17**

Baseline (2021): 13,21

Target (2041) : 14,59 – 16,61

Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)

▲ **7,86**

Baseline (2021): 7,84

Target (2041) : : 9,36 – 10,37

Sumber Data: RIPPP & BPS, 2025

KEGIATAN STRATEGIS-3

Dokumentasi Kegiatan Strategis #3



Peserta Diskusi:

- Bupati Kab Teluk Wondama
- BPKAD
- Bappedalitbang
- Dinas Pendidikan
- BPP Perwakilan Papua Barat

Photo: Rapat Koordinasi Akselerasi Percepatan Penyerapan DOK dan Kunjungan Lapang ke SMK Pelayaran di Kab. Teluk Wondama

Wondama, 30 November s.d 5 Desember 2025, BPP RI Perwakilan Papua Barat melalui POKJA Papua Cerdas melakukan Perjalanan Dinas ke Kabupaten Teluk Wondama. Tujuan perjalanan yaitu melaksanakan Fungsi SHEK (1) Akselerasi penyerapan anggaran DOK dan Penyusunan RAP, (2) Koordinasi dan Komunikasi rencana Pembangunan Sekolah Rakyat, (3) Tinjauan lapangan pendidikan vokasi SMK Pelayaran Kabupaten Teluk Wondama. Catatan penting hasil kunjungan lapangan di Kabupaten Teluk Wondama, diantaranya:

- Kesiapan lahan yang *clean* dan *clear*, Pemerintah Daerah Kabupaten siap untuk mempersiapkan syarat memperoleh dukungan. Komitmennya, telah disampaikan melalui surat permohonan ke Kementerian Sosial.
- Sampai dengan akhir November 2025, penyerapan belanja DOK telah mencapai 75%. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten tetap konsisten untuk menyiapkan syarat salur untuk memenuhi termin III tahun fiskal 2025.
- Peningkatan kualitas SMK harus segera dilakukan melalui revitalisasi Program Studi untuk menjawab ketersediaan IDUKA (Industri, Dunia Usaha, dan Dunia Kerja), melalui Prodi berbasis STEM (Sains, Teknologi, Engen, dan Matematika)



Terima Kasih

BADAN PENGARAH PAPUA

Laporan Kegiatan BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Barat

NOVEMBER 2025



Rapat Pleno Wakil Presiden Republik Indonesia bersama BP3OKP RI dan KEP2OKP RI

🇮🇩 04 November 2025 📍 GKN, Manokwari

👤 Wakil Presiden RI, BP3OKP, KEP2OKP, Gubernur

Rapat Pleno yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden RI membahas penguatan peran Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua (KEP2OKP) dalam percepatan pembangunan Papua. Wakil Presiden Republik Indonesia yang selaku Ketua BP3OKP menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan, peran masyarakat lokal (tokoh adat, agama, pemuda), pengembangan potensi lokal (kopi, sagu, ikan, pariwisata) melalui koperasi merah putih, dan pengawalan anggaran agar tepat sasaran.

✓ CAPAIAN:

Terbangunnya komitmen kerjasama antara BP3OKP, KEP2OKP, dan Pemerintah Daerah Papua Barat untuk memastikan anggaran pembangunan tepat sasaran dan dapat dirasakan oleh masyarakat khususnya OAP.



FGD Pengembangan Ekonomi Orang Asli Papua

📅 12 November 2025, 📍 Kantor BPP, Manokwari

👤 BP3OKP Papua Barat, DJPb Provinsi Papua Barat, MRP, DPR, OPD, Bank Indonesia, Bank Papua, Pelaku Usaha

Forum diskusi yang membahas pengembangan ekonomi OAP melalui program Papua Produktif. Dibahas tantangan dan peluang ekonomi Papua Barat, potensi hilirisasi komoditas unggulan (sagu, sukun, kelapa, kelapa sawit, ikan, udang), serta permasalahan UMKM seperti kurangnya proteksi produk lokal, lambatnya pencairan anggaran, dan keterbatasan infrastruktur. Forum ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perbankan, pelaku usaha, dan masyarakat.

✓ CAPAIAN:

BP3OKP akan terus mengambil peran strategis dalam mendukung kebijakan pemerintah, khususnya meningkatkan kualitas dan produktivitas ekonomi lokal sesuai RIPP 2022-2041 dan RAPP 2025-2029. Komitmen untuk membentuk Forum Ekonomi Papua Barat Produktif dan Perdamaian.



Pelatihan Evaluatur RAP OTSUS Provinsi Papua Barat

📅 13 November 2025, 📍 Swiss-bell Hotel Manokwari

👤 Pokja BP3OKP, Bappeda Provinsi & Kabupaten, dan DJPK Kemenkeu

Pelatihan yang membahas Sistem Administrasi dan Informasi Kampung Plus (SAIK+) dan evaluasi RAP OTSUS 2026. Dibahas proses penyesuaian alokasi OPD, penetapan target indikator, manajemen user, dan proses evaluasi RAP. DJPK menekankan urgensi evaluasi RAP sesuai PP 107/2021 dan PMK 33 untuk memastikan Dana Otsus dan DTI digunakan secara efektif, efisien, transparan, dan berdampak nyata. Diperkenalkan sistem interoperabilitas perencanaan dan penganggaran untuk konsistensi data dan percepatan evaluasi.

✓ CAPAIAN:

Pemahaman bersama terkait Pelatihan Evaluatur RAP OTSUS tahun 2026 dan sistem interoperabilitas untuk menjamin konsistensi data, mempercepat evaluasi RAP, dan meningkatkan efisiensi administrasi. Strategi pencapaian target indikator pembangunan RAPP Papua Barat 2025-2029.



Rapat Koordinasi Rencana Kerja BPP dan KEP2OKP Tahun 2026

📅 RI26-28 November 2025

📍 Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta

👤 Sekretariat BPP, BP3OKP, KEP2OKP, Setwapres

Rapat koordinasi untuk menyusun rencana kerja tahun 2026 antara BP3OKP RI, KEP2OKP RI, dan Sekretariat BPP.

Forum ini menghasilkan kesepakatan bersama untuk melaksanakan tugas SHEK dengan mengutamakan substansi yang relevan dan tepat sasaran, berpedoman pada RIPP, RAPP, dan SIPPP sesuai UU 2/2021. Komitmen untuk menjunjung tinggi integritas, akuntabilitas, dan transparansi, serta mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan SDM, anggaran, dan sarana prasarana.

✓ CAPAIAN:

Kesepakatan bersama untuk melaksanakan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan, meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dengan perencanaan terukur, dan komitmen Sekretariat BPP memberikan dukungan dan fasilitasi kegiatan BP3OKP dan KEP2OKP dengan sebaik-baiknya.



Rapat Koordinasi Teknis Akselerasi Penyerapan Anggaran 2025 dan RAP 2026

📅 19 November 2025

📍 Aula Kasuari, GKN Manokwari

👤 BP3OKP Provinsi Papua Barat, Sekda Provinsi Papua Barat, BPKAD, Bappeda, Bapenda, DJPb Provinsi Papua Barat, Inspektorat Provinsi Papua Barat

Rapat untuk mengevaluasi dan mempercepat penyerapan anggaran Provinsi Papua. Dibahas kendala penyaluran TKD, keterlambatan transfer dana dan SP2D, ketergantungan pada pelaporan SKPD, serta persiapan RAP 2026. Sekda memaparkan realisasi belanja dan berbagai kendala seperti perubahan administrasi, keterlambatan penetapan DPA, cuaca, dan gangguan aplikasi. Dibahas pula realisasi Dana Otsus dan DAK yang masih rendah.

✓ CAPAIAN:

Kabupaten Pegunungan Arfak telah menyalurkan hampir seluruh Dana Otsus



Audiensi Tindak Lanjut Aspirasi Masyarakat

📅 07 November 2025, 📍 Hotel Vitta Manokwari

👤 BP3OKP Perwakilan Papua Barat, Pokja Papua Cerdas, Komunitas Manokwari, Pelaku Usaha

Pertemuan untuk menindaklanjuti hasil pertemuan dengan Wakil Presiden terkait penyerahan dokumen aspirasi. Dibahas berbagai permasalahan masyarakat: kurangnya fasilitas pendingin dan kondisi pasar ikan yang tidak memadai (Asosiasi Pedagang Ikan), pentingnya pendidikan dan pembinaan SDM perempuan Papua dalam teknologi dan bahasa Inggris, minimnya keterlibatan kontraktor OAP dalam proyek besar, dan perlunya intervensi BP3OKP kepada balai-balai kementerian.

✓ CAPAIAN:

Komitmen bersama untuk pembentukan Forum Ekonomi Papua Barat Produktif dan Perdamaian yang menyatukan berbagai elemen masyarakat, pemerintah, dan pengusaha Orang Asli Papua.



Menghadiri Pembukaan Raker PAL-KOAP (Perkumpulan Asosiasi Lokal Kontraktor OAP)

📅 13 November 2025

📍 Gedung BPMP, Amban Manokwari

👤 BP3OKP, Pokja Papua Produktif

Kegiatan pembukaan Rapat Kerja Perkumpulan Asosiasi Lokal Kontraktor Orang Asli Papua (PAL-KOAP) yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan keterlibatan kontraktor OAP dalam pembangunan di Papua Barat.



Kunjungan Kerja ke Kabupaten Pegunungan Arfak

📅 24-29 November 2025

📍 Kabupaten Pegunungan Arfak

👤 Pokja Papua Sehat, Pokja Papua Produktif, BPKAD Kabupaten Pegunungan Arfak dan BAPPEDA Kabupaten Pegunungan Arfak

Kunjungan kerja untuk melakukan assessment dan koordinasi akselerasi penyerapan anggaran tahun 2025 dan RAP 2026, serta SHEK program kerja Papua Sehat tahun 2025. Penyerapan anggaran dengan target 90% akhir tahun. Diidentifikasi kendala keterlambatan transfer dana dan SP2D, ketergantungan pada pelaporan SKPD, dan berbagai permasalahan fasilitas vital seperti listrik dan air untuk rumah sakit dan dinonaktifkannya data BPJS bagi OAP.

✓ TINDAK LANJUT:

Mengejar penyerapan anggaran yang lemah, mendorong pencairan SP2D tertahan (DBH Migas OTSUS), mengadakan rapat koordinasi dengan Bappeda Provinsi, mengusulkan pembukaan keran kegiatan ke OPD lain, membentuk tim pembayaran hak wilayah, mengusulkan pembangunan rumah dinas dan mobil operasional dokter, menindaklanjuti permasalahan listrik dan air di rumah sakit, serta mendorong implementasi Kartu Papua Barat Sehat.



SHEK Puskesmas Anggi



SHEK Pratama Yosmar



**SHEK BPKAD Kab.
Pegunungan Arfak**



**SHEK BAPPEDA Kab.
Pegunungan Arfak**

Kunjungan Kerja ke Kabupaten Teluk Bintuni

🇮🇩 23-28 November 2025 Kabupaten Teluk Bintuni Pokja Papua Cerdas

Kunjungan kerja untuk melakukan assessment dan koordinasi akselerasi penyerapan anggaran tahun 2025 dan RAP 2026, dengan fokus pada: (1) Akselerasi Program Sekolah Rakyat, (2) Akselerasi Layanan Mutu Pendidikan Vokasi baik formal dan non-formal, (3) Akselerasi Layanan Program Guru 2 tahun untuk pemenuhan guru daerah 3T mencakup Kabupaten Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Manokwari Selatan, dan Kaimana.



Kunjungan Kerja SHEK ke Kabupaten Kaimana

🇮🇩 25-29 November 2025 Kabupaten Kaimana
Pokja Papua Cerdas, Papua Produktif, POLHUKAM

Kunjungan kerja komprehensif untuk melaksanakan SHEK dengan fokus pada: (1) Assessment dan koordinasi akselerasi penyerapan anggaran 2025 dan RAP 2026, (2) SHEK dan Kajian Dokumen Akademisi Program Sekolah Vokasi dan layanan pendidikan di Kepulauan Lobo, (3) SHEK Program Pariwisata Rintisan dan Pengembangan Pangan Lokal di Teluk Triton dan Kepulauan Lobo, (4) FGD dengan OPD teknis tentang Sekolah Vokasi dan Pariwisata Rintisan, (5) Harmonisasi keamanan dan pembinaan ketertiban melalui peningkatan peran aktif tokoh adat, agama, perempuan dan masyarakat.

L



Rapat Koordinasi Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Kesehatan Wilayah Papua

🇮🇩 26-28 November 2025

Swiss Bell Serpong, Tangerang Selatan, Banten Pokja Papua Sehat

Rapat koordinasi khusus membahas penugasan tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk wilayah Papua tahun 2025, sebagai upaya meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan kesehatan di daerah 3T. BP3OKP Papua Barat menekankan bahwa dalam mendatangkan tenaga dokter, harus tersedia sarana penunjang berupa alat kesehatan dan obat-obatan yang memadai agar tenaga dokter dapat bekerja secara efektif. Dokter dan tenaga kesehatan wajib bekerja secara maksimal dalam program penugasan khusus yang dibiayai melalui APBN. Kementerian Kesehatan segera mengirimkan surat kepada Gubernur dengan tembusan ke BP3OKP untuk melakukan sosialisasi mengenai program penugasan khusus tenaga kesehatan dan dokter yang pendanaannya bersumber dari APBN. Rumah sakit diwajibkan untuk melakukan pemetaan (mapping) jumlah tenaga dokter, yang mencakup dokter umum dan dokter spesialis yang tersedia.



Peringatan Hari Otonomi Khusus dan Launching Identitas Kependudukan Digital OAP

21 November 2025

Lapangan Apel Kantor Gubernur Papua Barat

BP3OKP, Gubernur, Wagub, OPD Papua Barat, Dirjen Dukcapil

Peluncuran Identitas Kependudukan Digital (IKD) Orang Asli Papua sebagai yang pertama di Indonesia, merupakan upaya percepatan layanan administrasi kependudukan berbasis digital. Program ini bertujuan mempermudah akses layanan publik, meningkatkan keamanan data, dan mendukung transformasi digital nasional. Gubernur Papua Barat menekankan inklusivitas layanan bagi masyarakat di wilayah pedalaman, kepulauan, dan komunitas adat, dengan prioritas keamanan data dan kolaborasi lintas sektor.

✓ CAPAIAN:

IKD OAP diharapkan dapat menjangkau seluruh OAP, mempermudah akses ke berbagai layanan seperti pendidikan, kesehatan, dan UMKM, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital. Dirjen Dukcapil mengapresiasi peluncuran ini dan menyoroti pentingnya data kependudukan akurat untuk pembangunan dan penanganan identitas ganda.



1. **PENINGKATAN AKSES dan MUTU PELAYANAN KESEHATAN;**
Indikator ini mengukur seberapa baik masyarakat dapat mengakses layanan Kesehatan yang berkualitas

- ✓ Persentase penduduk yang memiliki akses ke FASYANKES DASAR yang layak
- ✓ Persentase tenaga Kesehatan yang terlatih dan tersebar merata; dokter, perawat, bidan, ahli Gizi dll
- ✓ Ketersediaan obat-obatan dan Alkes

2. **PENURUNAN ANGKA KESAKITAN dan KEMATIAN;**
Indikator ini bertujuan untuk mengurangi prevalensi penyakit dan mortalitas, terutama dikalangan kelompok rentan

- ✓ Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)
- ✓ Penurunan prevalensi penyakit menular; TBC, HIV-AIDS, Malaria (upaya pencegahan, deteksi dini dan pengobatan dini)
- ✓ Penurunan prevalensi penyakit tidak menular (PTM); Hipertensi, DM, Jantung, Stroke, Gagal Ginjal, Kanker (edukasi dan promosi gaya hidup sehat)

3. **PENINGKATAN GIZI MASYARAKAT;**
Indikator ini berfokus pada perbaikan status gizi, terutama untuk mencegah stunting dan gizi buruk.

- ✓ Penurunan prevalensi stunting pada Balita
- ✓ Persentase Balita yang mendapatkan imunisasi lengkap
- ✓ Persentase ibu hamil yang mendapatkan suplementasi gizi

4. **PENGEMBANGAN SISTEM JAMINAN KESEHATAN DAERAH**
Indikator ini mengukur cakupan jaminan Kesehatan yang diberikan kepada masyarakat Papua Barat

- ✓ Persentase penduduk yang terdaftar dalam program jaminan kesehatan
- ✓ Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan program jaminan Kesehatan; mencakup kemudahan pendaftaran dan klaim

- 1. PAPUA SEHAT: Penguatan FASYANKES di PUSTU, PUSKESMAS dan Rumah Sakit**
penyediaan infrastruktur pendukung (listrik, air bersih), rumah dinas tenaga medis, dan kendaraan operasional untuk menjamin keberlanjutan layanan kesehatan di daerah terpencil.
- 2. PAPUA SEHAT: Implementasi Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan**
Tindaklanjuti hasil Rakornis Penugasan Khusus dengan menyediakan paket insentif menarik, fasilitas memadai, dan sistem rotasi yang jelas bagi tenaga medis yang bertugas di wilayah 3T, serta implementasi Kartu Papua Barat Sehat untuk menutup pembiayaan kesehatan yang tidak ditanggung BPJS.
- 3. PAPUA PRODUKTIF: Pengembangan Ekonomi Berbasis Komoditas Unggulan Lokal**
Fokuskan hilirisasi dan industrialisasi komoditas sagu, sukun, kelapa sawit, kopi, ikan, dan udang melalui pembangunan cold storage, mesin es, dan fasilitas pengolahan yang melibatkan OAP sebagai pelaku utama dengan dukungan pembiayaan dari Koperasi Merah Putih dan KUR.
- 4. PAPUA PRODUKTIF: Pengembangan Pariwisata Rintisan Berbasis Kearifan Lokal**
Kembangkan destinasi wisata di Teluk Triton dan Kepulauan Lobo Kabupaten Kaimana dengan melibatkan masyarakat lokal, tokoh adat, dan UMKM sebagai pelaku utama, disertai pelatihan SDM pariwisata dan penyediaan infrastruktur dasar.
- 5. PAPUA CERDAS: Akselerasi Program Sekolah Rakyat dan Pendidikan Vokasi**
Percepat implementasi Sekolah Rakyat di seluruh kabupaten dengan fokus pada pendidikan vokasi berbasis potensi lokal (pertanian, perikanan, kelautan, pariwisata) untuk menciptakan SDM terampil yang siap kerja dan berwirausaha.
- 6. PAPUA CERDAS: Program Guru 2 Tahun untuk Pemenuhan Kebutuhan Guru 3T**
Operasionalisasi program penugasan guru 2 tahun di daerah 3T (Kabupaten Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Manokwari Selatan, dan Kaimana) dengan penyediaan insentif, fasilitas, dan jenjang karir yang jelas untuk menarik dan mempertahankan tenaga pendidik berkualitas.
- 7. PAPUA CERDAS: Pendidikan dan Pembinaan SDM Perempuan Papua**
Rancang program khusus untuk peningkatan kapasitas perempuan OAP dalam penguasaan teknologi digital, Bahasa Inggris, kewirausahaan, dan manajemen usaha agar dapat berpartisipasi aktif dalam ekonomi produktif dan tidak tertinggal dalam era digital.